



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN POLA KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pemalang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

Sp.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I PEDOMAN POLA KLASIFIKASI

Pasal 1

Pola Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Pola Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pola Klasifikasi untuk penataan arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Pasal 3

Pedoman Pola Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 81 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2006 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang Jaya.

Ditetapkan di Pematang Jaya
Pada tanggal 10 April 2018

BUPATI PEMATANG JAYA,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang Jaya
pada tanggal 10 April 2018

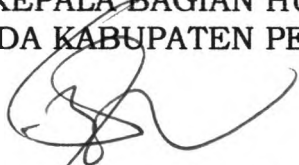
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG JAYA,**

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG JAYA TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMATANG JAYA**


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 20 TAHUN 2018
 TENTANG PEDOMAN POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PEMALANG

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (provinsi/Kabupaten/Kota)
002	Tanda Kehormatan/penghargaan (khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan Secara Adat
002.6	Penghargaan Lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dsb)
003	Hari Raya/Besar
003.1	Nasional, 17 Agustus, Hari Pahlawan dsb
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun (HUT)
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat Lainnya
007	Tanda gambar presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah
010	URUSAN DALAM
011	Gedung Kantor, termasuk instalasi
011.1	Listrik
011.2	Telephon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Bak
011.6	Hidrant
011.7	Alarm
012	Rumah Dinas
012.1	Tanah Untuk Rumah Dinas
012.2	Perabotan
013	Akomodasi/Persinggahan (Mess, Wisma, Hotel)
014	Rumah Susun/Apartemen
015	Peminjaman sarana prasarana kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll)
016	Telephon
017	Keamanan/ketertiban kantor

018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.2	Tata Tempat (Pemasangan gambar Presiden/Wakil Presiden)
019.3	Audiensi
019.4	Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
019.5	Penerimaan Tamu
019.6	Kerjasama
019.7	Bendir/Umbul-umbul
020	PERALATAN
020.1	Penawaran
020.2	Penawaran Barang
020.3	Penawaran Jasa
021	Alat Tulis
022	Mesin Kantor
022.1	Manual
022.2	Elektronik
023	Perabot Kantor
024	Alat Angkutan
024.1	Orang
024.2	Barang
024.21	Barang Bergerak
024.22	Barang tidak bergerak
025	Pakaian Dinas
026	Senjata
027	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjukan, lelang.
027.1	Prakualifikasi: rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/anwijzing, negoisasi, evaluasi
027.2	SPK, Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran
027.3	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
027.4	Serah terima pekerjaan
027.5	Pemeriksaan pekerjaan
027.6	Perpanjangan waktu/force majeure
027.7	Denda
027.8	Sanggahan
027.9	Pemeliharaan barang/jasa
028	Inventaris
028.1	Pendataan Barang Milik Negara
028.2	Pemeliharaan Barang Milik Negara
028.3	Penghapusan Barang Milik Negara
029	Pengurusan Kendaraan
030	KEKAYAAN DAERAH
031	Barang-barang tidak bergerak (tanah, perkebunan, pertanian, hutan, tambak)
032	Barang-barang tidak bergerak (gedung, asrama, monumen/bangunan bersejarah dll)
033	Tanaman
034	Alat-alat besar
035	Hewan
036	Barang persediaan dalam gudang
037	Alat angkutan (darat, laut, udara)
038	Peralatan kantor/pabrik
039	Peralatan kesehatan/medis (Rumah sakit, balai pengobatan)

- 040 PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI
- 041 Perpustakaan
 - 041.1 Pameran Bahan Perpustakaan
 - 041.2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
 - 041.3 Sirkulasi/layanan
 - 041.31 Keanggotaan
 - 041.32 Peminjaman dan pengembalian
 - 041.4 Deposit
 - 041.5 Pemeliharaan, pelestarian/alih media
 - 041.6 Pembinaan Perpustakaan
 - 041.61 Bantuan buku, rak
 - 041.7 Penghapusan/penyusunan bahan perpustakaan
 - 041.8 Jenis-jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
 - 041.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
- 042 Dokumentasi
- 045 Kearsipan
 - 045.1 Pola Klasifikasi
 - 045.11 Surat Pengantar
 - 045.12 Surat Keterangan
 - 045.13 Pengurusan Surat
 - 045.2 Akuisisi Arsip
 - 045.3 Penyusutan Arsip
 - 045.31 Jadwal Retensi Arsip
 - 045.32 Penilaian Arsip
 - 045.33 *Pemindahan Arsip*
 - 045.34 Penyerahan Arsip
 - 045.35 Pemusnahan Arsip
 - 045.4 Pembinaan Kearsipan
 - 045.41 Pengawasan
 - 045.42 Bimbingan Kearsipan
 - 045.5 Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip
 - 045.51 Fumigasi dan Termit Control
 - 045.52 Laminasi
 - 045.53 Alih Media
 - 045.6 Layanan
 - 045.7 Pemasyarakatan
 - 045.71 Pameran
 - 045.72 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
 - 045.73 Sosialisasi Kearsipan
 - 045.8 Pengembangan Sistem
 - 045.81 Sistem Kearsipan
 - 045.82 Sistem jaringan informasi kearsipan
- 046 Sandi
- 047 Telegram, Telex, Radio, ISB
- 048 Data Elektronik
- 050 PERENCANAAN DAN EVALUASI

Meliputi Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Perencanaan Umu Departemen Dalam Negeri. Klasifikasi disini proyek-proyek pembangunan, RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), DUK, DIK, DUP, DPA, RKA, Laporan fisik keuangan proyek pembangunan, Musrenbang.

- 050.1 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Manengah Nasional)
- 050.11 RENSTRA (Rencana Strategi)
- 050.12 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
- 050.13 RENSTRA BAPPEDA
- 050.14 Bantuan Pembangunan Daerah
- 050.2 Program Nasional
- 050.21 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
- 050.22 RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
- 050.23 Rencana Kerja SKPD
- 050.24 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (penetapan Plafon Anggaran Sementara)
- 050.25 RKT (Rencana Kerja Tahunan)
- 050.26 RKO (Rencana Kerja Operasional)
- 051 Laporan
 - 051.1 Laporan Berkala
 - 051.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- 052 Evaluasi
 - 052.1 Evaluasi Rencana Strategis
 - 052.11 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 - 052.12 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - 052.13 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
 - 052.14 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 060 ORGANISASI/KETATALAKSANAAN
- 061 Organisasi
 - 061.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - 061.2 Tata Tertib Kantor, termasuk pengaturan hari dan jam kerja pegawai
- 062 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi Badan Internasional
- 064 Organisasi Semi Pemerintah
- 065 Ketatalaksanaan
 - 065.1 Tata Naskah Dinas
 - 065.2 Stempel dinas dan stempel jabatan
 - 065.3 Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah
 - 065.4 Alamat-alamat kantor dan pejabat
 - 065.5 Ketentuan pakaian dinas dan atribut
- 066 Tata Hubungan Kerja
- 067 Standart Operasional Prosedur
- 068 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
- 069 Analisis Jabatan
 - 069.1 Pengukuran / Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
 - 069.2 Uraian Jabatan
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 071 Riset meliputi perijinan bagi peneliti, riset design, pembahasan sampai dengan laporan akhir riset
- 072 Survey
 - 072.1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
 - 072.2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
 - 072.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi, Kab/Kota, Desa Inovatif
 - 072.4 Inkubator Teknologi dan Bisnis

- 072.5 Pameran produk inovasi/ristek
- 072.6 BTC (Bisnis Teknologi Center)
- 072.7 Rapterk (Penerapan Iptek)
- 072.8 HKI (Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual)
- 073 Kajian
 - 073.1 Kajian strategis / diskusi / Forum Group Discussion (FGD)
 - 073.2 Seminar
 - 073.3 Workshop
 - 073.4 Rapat Koordinasi / Rapat Teknis
 - 073.5 Lokakarya
 - 073.6 Diseminasi / sosialisasi hasil penelitian
- 074 Kerjasama Penelitian
 - 074.1 Instansi Pemerintah Pusat / Daerah
 - 074.2 Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
 - 074.3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
 - 074.4 Lembaga Internasional
- 075 Perekrayaan
- 076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
- 077 Publikasi Ilmiah
 - 077.1 Jurnal Ilmiah
- 080 KONPERENSI / RAPAT KOORDINASI
- 081 Gubernur
- 082 Bupati / Walikota
- 083 Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
- 084 Instansi lainnya (diluar Kemendagri)
- 085 Internasional di dalam negeri
- 086 Internasional di luar negeri
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan PNS, meliputi Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Tugas
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden / Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri Ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
- 100 PEMERINTAHAN
- 110 PEMERINTAHAN PUSAT
- 111 Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
 - 111.1 Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR
 - 111.2 Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan.
- 113 Susunan Kabinet
 - 113.1 Reshuffle
 - 113.2 Penunjukan Menteri ad interim
 - 113.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
- 114 Kementerian Dalam Negeri
 - 114.1 Amanat Menteri Dalam Negeri

115	Kementerian lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi Daerah
119	Kerjasama antar Kementerian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahan kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri
121	Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
122	Wakil Gubernur, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
124	Badan-badan pertimbangan Daerah, meliputi Muspida
125	Pembentukan/pemekaran
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan Wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah
125.5	Permasalahan Batas Wilayah
125.6	Pemindahan Ibukota Provinsi
125.7	Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
130	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
130.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota
130.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati / Walikota (LKPJ)
130.03	Monografi
130.1	Koordinasi
130.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
130.12	Instansi Vertikal
130.13	Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
131	Bupati / Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Bupati / Walikota, meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
133	Sekretaris Daerah, meliputi pencalonan, serah terima jabatan
134	Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah, meliputi Muspida
135	Pembentukan Daerah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom
135.2	Pembentukan Wilayah
135.3	Perubahan Batas Wilayah
135.4	Pemekaran Wilayah
135.5	Permasalahan Batas Wilayah
135.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota

- 135.7 Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, jalan
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan
- 138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan
 - 138.1 Pembentukan Kecamatan
 - 138.2 Pemekaran Kecamatan
 - 138.3 Perluasan/perubahan batas wilayah kecamatan
 - 138.4 Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
 - 138.5 Laporan Kecamatan
- 140 PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
- 141 Pemerintah Desa
 - 141.1 Kepala Desa/Kelurahan meliputi: Pemilihan, pengangkatan,
 - 141.11 Biaya pemilihan kepala desa
 - 141.2 Lembaga Musyawarah Desa, meliputi pembentukan
 - 141.3 Perangkat Desa, Kelurahan
 - 141.31 Sekretaris Desa, Kelurahan meliputi: pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
 - 141.32 Kepala Dusun meliputi: pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian, pemberhentian sementara
 - 142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan
(APBDes/Kel)
 - 143 Kekayaan Desa
 - 143.1 Tanah Hak Pakai Desa
 - 143.11 Tanah Bengkok
 - 143.12 Tanah Titisara
 - 143.13 Tanah Penganggonan
 - 143.14 Tanah Desa Lainnya
 - 143.2 Jalan Desa
 - 143.3 Bangunan Desa
 - 144 Lembaga Tingkat Desa: Rembug Desa, Badan Permusyawaratan
 - 145 Administrasi Desa/Kelurahan: Monografi, Peta Rupa Bumi dll
 - 145,1 Sistem Informasi Desa
 - 146 Kewilayahan
 - 146.1 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - 146.2 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - 146.3 Perubahan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan
 - 146.4 Perubahan nama-nama Desa/Kelurahan
 - 146.7 Penghapusan Desa/Kelurahan
 - 147 RT/RW
 - 150 LEGISLATIF MPR/DPR
 - 151 Keanggotaan
 - 151.1 Pencalonan
 - 151.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
 - 151.3 Pemberhentian
 - 151.31 Recall
 - 151.32 Meninggal
 - 151.4 Pelanggaran
 - 151.5 Pergantian antar waktu
 - 152 Persidangan
 - 153 Kesejahteraan
 - 153.1 Keuangan
 - 153.2 Penghargaan
 - 154 Hak

155	Keanggotaan DPR
155.1	Pencalonan
155.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
155.3	Pemberhentian
155.31	Recall
155.32	Meninggal
155.4	Pelanggaran
156	Persidangan
156.1	Sidang Pleno
156.2	Dengar Pendapat
156.3	Rapat Komisi
156.4	Reses
157	Kesejahteraan
157.1	Keuangan
157.2	Penghargaan
158	Jawaban Pemerintah
159	Hak
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161.3	Pemberhentian
161.31	Recall
161.32	Meninggal
161.4	Pelanggaran
162	Persidangan
162.1	Sidang Pleno
162.2	Dengar Pendapat
162.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb
162.4	Fraksi
162.5	Tata Tertib
162.6	Reses
162.7	Peninjauan studi banding
163	Kesejahteraan
163.1	Keuangan
163.2	Penghargaan
164	Hak
165	Sekretaris DPRD Provinsi
170	DPRD KABUPATEN/KOTA
171	Keanggotaan
171.1	Pencalonan
171.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
171.3	Pemberhentian
171.31	Recall
171.32	Meninggal
171.4	Pelanggaran
172	Persidangan
172.1	Sidang Pleno
172.2	Dengar Pendapat
172.3	Rapat-rapat meliputi rapat panitia musyawarah, komisi, panitia khusus, dsb
172.4	Fraksi

	172.5	Tata Tertib
	172.6	Reses
	172.7	<i>Peninjauan studi banding</i>
173		Kesejahteraan
	173.1	Keuangan
	173.2	Penghargaan
174		Hak
175		Sekretaris DPRD Kab/Kota
180		HUKUM
	180.1	Konstitusi
	180.11	Dasar Negara
	180.12	Undang-undang Dasar
	180.13	Undang-Undang
	180.14	Peraturan Pemerintah
	180.15	Keppres/Perpres/Inpres
	180.16	Kepmen/Permen/Inmen
	180.17	<i>Perundangan Tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepgub/Pergub/Ingub</i>
	180.18	<i>Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota meliputi Perda, KepBud/KepWal, PerBup/PerWal</i>
	180.19	<i>Perundangan tingkat desa meliputi peraturan desa, keputusan kepala desa</i>
	180.2	Tap MPR
	180.3	Konvensi
181		Perdata
	181.1	Tanah
	181.2	Rumah
	181.3	Utang/Piutang
	181.31	Gadai
	181.32	Hipotik
	181.4	Notariat
182		Pidana
	182.1	Tindak Pidana Umum
	182.2	Tindak Pidana Khusus
183		Peradilan
	183.1	Jenis-jenis Peradilan
	183.11	<i>Peradilan Umum</i>
	183.111	<i>Peradilan Negeri Tingkat Pertama</i>
	183.112	<i>Peradilan Tinggi</i>
	183.113	<i>Mahkamah Agung</i>
	183.12	<i>Peradilan Agama Islam</i>
	183.121	<i>Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama</i>
	183.122	<i>Pengadilan Tinggi Agama Islam</i>
	183.123	<i>Mahkamah Islam Agung</i>
	183.13	<i>Peradilan Militer</i>
	183.131	<i>Mahkamah Militer Tingkat Pertama</i>
	183.132	<i>Mahkamah Militer Tinggi</i>
	183.133	<i>Mahkamah Militer Agung</i>
	183.14	<i>Peradilan Tata Usaha Negara</i>
	183.141	<i>Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama</i>
	183.142	<i>Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</i>
	183.143	<i>Mahkamah Tata Usaha Negara Agung</i>
	183.15	<i>Peradilan Tindak Pidana Korupsi</i>
	183.16	<i>Peradilan Hak Asasi Manusia</i>

183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustmen
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verset
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan Hukum, meliputi LBH
183.41	Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
183.5	Bantuan Hukum
183.51	Lembaga Bantuan Hukum
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
185.1	Visa
185.2	Paspor
186	Kepenjaraan
187	Kejaksaan
188	Peraturan Perundang-undangan
189	Hukum Adat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
192	Tamu Negara
193	Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing
194	Perwakilan RI di Luar Negeri
195	PBB
196	Laporan Luar Negeri
200	POLITIK
201	Perencanaan dan program Pembinaan Politik Luar Negeri
201.1	Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
201.2	Kesatuan Bangsa
201.3	Pelaksanaan pembinaan politik dalam negeri termasuk laporanya
201.4	Keadaan politik Luar Negeri
201.5	Evaluasi dan pengawasan pembinaan ipoleksosbud, Kamtibmas
201.6	Orde Baru
201.7	Orde Reformasi
210	KEPARTAIAN
211	Pendirian/pembentukan PARPOL
211.1	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL
211.2	Program kerja data kegiatan PARPOL
211.3	Pembinaan PARPOL
211.4	Hasil Munas/Musda PARPOL
211.5	Struktur/kepengurusan, pengkaderan dan keangotaan PARPOL
211.6	Data inventaris dan keuangan PARPOL
212	Partai/Organisasi Terlarang
212.1	Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang
212.2	Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang

212.3	ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang
212.4	Daftar berkala mengenai keadaan organisasi/anggota partai/organisasi terlarang
212.5	Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/organisasi terlarang
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Berdasarkan Perjuangan
221.1	Perintis Kemerdekaan
221.2	Angkatan 45
221.3	Veteran
222	Berdasarkan Kekaryaan
222.1	PEPABRI
222.2	Rwreda Tama
222.3	Pensiunan PNS
223	Berdasarkan Kerokhanian
223.1	Muhamadiyah
223.2	NU
223.3	Persatuan Tarikat Islam
224	LSM
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Ikatan Dokter Indonesia
232	Persatuan Guru Republik Indonesia
233	Persatuan Sarjana Hukum Indonesia
234	Persatuan Advokat Indonesia
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
237	Persatuan Wartawan Indonesia
238	Ikatan Arsiparis Indonesia
239	Ikatan Pustakawan Indonesia
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Gerakan Pemuda Ansor
245	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
246	Gerakan Pemuda Marhaenis
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	Federasi Buruh Seluruh Indonesia
252	Organisasi Buruh Internasional
253	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (GAPOKTAN)
254	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Persatuan Wanita Republik Indonesia
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Nomor Urut/Tanda Gambar
273	Kampanye
273.1	Dana Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana

	276.1	TPS
	276.2	Kendaraan
	276.3	Surat Suara
	276.4	Kotak Suara
277		Pemungutan Suara/Penghitungan Suara
278		Hasil Pemilu
	278.1	Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif
	278.2	Penetapan pemenang pilkada
279		KPU/KPUD
280		PENGAWASAN PEMILU/PILKADA
281		Pemantauan
282		Pelanggaran
283		Sengketa
284		Panwaslu
300		KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM
	300.1	Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan
	300.2	Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan
	300.3	Pencegahan dan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum
	300.4	Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan
301		Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantribum)
302		Pengawasan Trantribum
303		Penegakan Pelaksanaan Perda
304		Pembinaan/penyuluhan pelanggaran Perda
305		Patroli Wilayah
306		Laporan kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
	306.1	Pengamanan
	306.2	Pengawalan
307		Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan
310		PERTAHANAN
311		Darat
312		Laut
313		Udara
314		Ketahanan Bangsa
315		Ketahanan Ekonomi
316		Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
320		KEMILITERAN/TNI
321		Latihan Militer
322		Wajib Militer
323		Operasi Militer
324		Kekayaan TNI
325		Kemanunggalan TNI dengan rakyat
330		KEAMANAN
331		Kepolisian
	331.1	Polisi Pamong Praja
332		Huru-hara/Demonstrasi
333		Senjata Api/Tajam
334		Bahan Peledak
335		Perjudian
336		Surat-surat kaleng

337	Pengaduan Masyarakat
338	Himbauan atau larangan
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/pemberhentian anggota Linmas
341.2	Pendidikan/latihan Linmas
341.3	Pelatihan PAM Swakarsa
341.4	Pendidikan/latihan MENWA
342	Pengerahan dan pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian Tali Asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan Modal Usaha bagia anggota Linmas
343.3	Santunan uang duka bagia anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi Kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontakan/Terrorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
354	Subversi/Penyelundupan/Narkotika
355	Penipuan dan Pemalsuan
356	Korupsi/penyelewengan/penyalahgunaan jabatan
357	Kekerasan pada Perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban
358	Kenakalan
359	Kejahatan lainya (trafficking, hipnotis, dll)
360	BENCANA
361	Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
362	Banjir/Tanah Longsor
363	Angin Topan
364	Kebakaran
364.1	Pemadam Kebakaran
365	Kekeringan
366	Posko Bencana
367	Koordinasi/Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
368	MOU Pemerintah Pusat BNPB
370	KECELAKAAN
371	Latihan SAR
372	Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam
373	Pelatihan manajemen bagi pejabat
374	Satkorlak dan Satlak PBP
375	Pelatihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBP
376	Latihan ketrampilan pemadam kebakaran
377	Kecelakaan Darat, Laut, Udara
378	Investigasi/penyelidikan kecelakaan
379	Asuransi Kecelakaan
380	PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
381	Perencanaan

381.1	Perencanaan teknis
381.2	Rekomendasi
382	Bantuan Bencana
383	Penanggulangan Bencana dengan pihak lain
384	Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
385	PUSDALOPS
386	Kunjungan lapangan
387	Relawan
388	Laporan Bencana
390	KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
391	Instansi Pemerintah Pusat
392	Instansi Pemerintah di Daerah
393	Lembaga Internasional
394	Lembaga Non Pemerintah Nasional
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kesejahteraan Rakyat
410	PEMBANGUNAN DESA / KELURAHAN
411	Gotong-royong
411.1	Swadaya gotong royong
411.11	Pembinaan
411.12	Pungutan
411.2	Lembaga Sosial Desa
411.3	Latihan Kerja Masyarakat
411.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
411.5	Penyuluhan Masyarakat Desa
411.6	Kelembagaan Desa
411.7	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
412	Perekonomian Desa
412.1	Produksi Desa
412.11	Pengolahan
412.12	Pemasaran
412.2	Keuangan Desa / Dana Desa (DD)
412.21	Inventarisasi Data
412.22	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
412.23	Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
412.24	Bantuan / Stimulasi (<i>Bantuan Keuangan</i>)
412.25	Perkreditan Desa
412.26	Pelaporan
412.27	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) / (PMD)
412,28	Musyawarah Desa (MAD)
412.3	Koperasi Desa
412.31	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)/BUMDES
412.32	Koperasi Unit Desa (KUD)
412.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
412.41	Jumlah Desa yang diberi bantuan
412.42	Pengarahan
412.43	Pusat
412.44	Daerah
412.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa (ADD)
412.51	Pusat

- 412.52 Daerah
- 413 Sarana dan Prasarana Desa / Program TMMD
 - 413.1 Pemukiman Kembali Penduduk
 - 413.2 Pemugaran perumahan dan lingkungan desa (RTLH)
 - 413.3 Perbaikan Kampung
 - 413.4 Teknologi Tepat Guna
- 414 Pengembangan Desa
 - 414.1 Tingkat Perkembangan Desa
 - 414.12 Jumlah Desa
 - 414.13 Pemekaran Desa
 - 414.14 Pembentukan Desa Baru
 - 414.15 Evaluasi dan pengawasan pembinaan ipoleksosbud, Kamtibmas
 - 414.16 Bagian
 - 414.2 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan
 - 414.21 Penyuluhan program/fasilitas program
 - 414.22 Lokasi UDKP
 - 414.23 Pelaksanaan
 - 414.24 Bimbingan / Pembinaan
 - 414.25 Evaluasi
 - 414.3 Tata Desa/Profil Desa dan Kelurahan
 - 414.31 Inventarisasi
 - 414.32 Penyuluhan Pola Tata Desa
 - 414.33 Pemetaan
 - 414.34 Pedoman Pelaksanaan
 - 414.35 Evaluasi
 - 414.4 Perlombaan Desa
 - 414.41 Pedoman
 - 414.42 Penilaian
 - 414.43 Kejuaraan
 - 414.44 Piagam
 - 414.5 Desa Siaga
- 415 Koordinasi
 - 415.1 Kerjasama
 - 415.11 Luar Negeri (Unicef)
 - 415.12 Perguruan Tinggi
 - 415.13 Kementerian/Lembaga Pemerintah
 - 415.14 Departemen / Lembaga Non Departemen
- 420 PENDIDIKAN
 - 420.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan
 - 420.2 Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb
 - 420.3 Pendidikan Masyarakat
- 421 Sekolah (termasuk akreditasi)
 - 421.1 Pra Sekolah (PAUD, Playgroup)
 - 421.2 Sekolah Dasar
 - 421.3 Sekolah Menengah
 - 421.4 Sekolah Kejuruan
 - 421.5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)
 - 421.6 Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
 - 421.7 Kegiatan pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata, lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar.

- 421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- 421.9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - 422.1 Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK
 - 422.2 Tahun Pelajaran
 - 422.3 Hari Libur
 - 422.4 Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI
 - 422.5 Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi
 - 422.6 Ijasah, Sertifikat
 - 422.7 Bantuan Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
- 423 Metode Belajar
 - 423.1 Kuliah
 - 423.2 Ceramah, Simposium, Seminar
 - 423.3 Diskusi
 - 423.4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL, Prakerin
 - 423.5 Kurikulum
 - 423.6 Karya Tulis, Karya Ilmiah
 - 423.7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, Guru/Dosen Teladan, Guru/Dosen Berprestasi)
 - 424.1 Pertukaran Guru ke Luar Negeri
 - 424.2 Sertifikasi Guru
- 425 Sarana Pendidikan
 - 425.1 Bangunan Pendidikan
 - 425.11 Gedung Sekolah
 - 425.12 Kampus
 - 425.13 Pusat Kegiatan
 - 425.14 Perpustakaan
 - 425.15 Laboratorium
 - 425.2 Buku
 - 425.3 *Perlengkapan Pendidikan*
 - 425.4 Sistem informasi pendidikan
 - 425.5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
- 426 KEOLAHRAGAAN
 - 426.1 Pembinaan Keolahragaan
 - 426.11 Olah Raga Prestasi (PON,Sea Games, Kejurnas, Olimpiade)
 - 426.12 Olah Raga Pendidikan (POPDA, SD, PORSENI dll)
 - 426,13 Olah Raga Rekreasi/Massal (Senam, Sepeda Santai, Olah raga Tradisional)
 - 426,14 Iptek dan Industri Olah Raga
 - 426,15 Sarana dan Prasarana Keolahragaan
 - 426,2 Kemitraan Olah Raga
- 427 KEPEMUDAAN
 - 427.1 Pertukaran Pemuda
 - 427.2 Paskibraka
 - 427.3 Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja: Gelanggang Remaja
 - 427.4 Kemitraan Pemuda
 - 427.5 Karang Taruna
- 428 Kepramukaan / Kepanduan
- 430 KEBUDAYAAN
 - 430,1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan

- 430,2 Pembinaan Bidang Kebudayaan
- 431 Kesenian
 - 431,1 Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Lukis, dll)
 - 431.2 Sarana
 - 431.21 Gedung Kesenian
 - 431.22 Padepokan
 - 431.23 Lembaga Adat
 - 431.24 Kegiatan Adat / Tradisi
 - 431.3 Usaha pertunjukan, hiburan, kesenangan: Festival, Pentas Seni
- 432 Kepurbakalaan
 - 432.1 Museum
 - 432.2 Peninggalan Kuno
 - 432.21 Candi termasuk pemugaran
 - 432.22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Penghayat Kepercayaan
- 440 KESEHATAN
 - 440.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kesehatan
- 441 Pembinaan Kesehatan
 - 441.1 Gigi
 - 441.2 Mata
 - 441.3 Jiwa
 - 441.4 kanker
 - 441,5 UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
 - 441.6 Perawatan
 - 441.7 Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan, Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb
 - 441.8 Kesehatan Ibu dan Anak
 - 441.9 JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)
 - 441.91 BPJS
- 442 Obat-obatan
 - 442.1 Pengadaan
 - 442.2 Pemeriksaan obat
 - 442.3 Penyimpanan obat
 - 442.4 Distribusi obat
 - 442.5 Pengawasan obat
 - 442.51 Obat Generik
 - 442.52 Obat Terlarang
 - 442.53 Pemalsuan Obat
- 443 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
 - 443.1 Pencegahan Penyakit
 - 443.2 Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
 - 443.21 Kusta
 - 443.22 Kelamin, HIV, AIDS, IMS
 - 443.23 Frambusia
 - 443.24 T. B. C
 - 443.25 Kholera
 - 443.26 SARS dan jenis penyakit lainnya
 - 443.3 Pemberantasan penyakit menular sumber binatang (P2B)
 - 443.31 Malaria
 - 443.32 Dengue Haermorrhagic Fever (DHF), DBD

- 443.33 Filaria
- 443.34 Serangga
- 443.35 Rabies
- 443.36 Antrak
- 443.37 Leptosirosis
- 443.38 Chikungunya
- 443.39 Penyakit lainnya
- 443.4 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
- 443.41 A. Pektoris
- 443.42 IMA (Irama Mastemik Akut)
- 443.43 Hipertensi
- 443.44 Stroke
- 443.45 Diabetes Melitus
- 443.46 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Serviks
- 443.47 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Mammae
- 443.48 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA. Hepar
- 443.49 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Paru, dan Penyakit lainnya
- 443.5 Epidemiologi dan Karantina (Epidka)
- 443.51 Imunisasi
- 443.52 Surveilanse
- 443.53 Pestisida
- 443.54 Pencemaran Udara
- 443.55 Jamban Keluarga
- 443.56 Kesehatan Institusi
- 443.6 Higiene Sanitasi
- 443.61 Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
- 443.62 Sarana Air Minum
- 443.63 Pestisida, Insektisida
- 443.64 Pencemaran
- 443.65 Jamban Keluarga, Sanitasi Rumah Tangga
- 443.66 Kesehatan Institusi, misal: Poskestren, sanitasi masjid dll
- 443.67 Higiene Sanitasi CA. Mammae
- 443.68 Higiene Sanitasi CA. Hepar
- 443.69 Higiene Sanitasi CA. Paru
- 443.7 Kejadian Khusus
- 443.71 Dekompensasiokardosis (serangan jantung)
- 443.72 Asma
- 443.73 Psikosis
- 443.74 PPOM
- 443.75 Kecelakaan Lalu Lintas
- 443.76 Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 444 Gizi dan Pengawasan Makanan
- 444.1 Kekurangan Makanan
- 444.2 Bahaya kelaparan, busung lapar, gizi buruk
- 444.3 Keracunan Makanan
- 444.4 Menu Makanan Rakyat
- 444.5 Gondok Endemik (GAKI)
- 445 RSU, RSJ, RS Khusus
- 445.1 Pelayanan medis (termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisi pasien, visum)
- 445.11 Rawat Inap

- 445.12 Rawat Jalan
- 445.13 IGD
- 445.14 IBS
- 445.15 ICU
- 445.16 MCU (Medical Check Up)
- 445.2 Penunjang Medis
 - 445.21 Farmasi
 - 445.22 Rekam Medik
 - 445.23 Radiologi
 - 445.24 Gizi
 - 445.25 Laboratorium Klinik
 - 445.26 Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
 - 445.27 Bank Darah Rumah Sakit
 - 445.28 Sanitasi Rumah Sakit
 - 445.29 CSSD / Laundry
- 445.3 Keperawatan
- 445.4 Komite Medik
- 445.5 SPI (Satuan Pengawas Internal)
- 445.6 Mutu Rumah Sakit
 - 445.61 Akreditasi
 - 445.62 ISO
 - 445.63 PSBH (*Problem Solving for Better Hospital*)
 - 445.64 IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
- 445.7 IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)
- 445.8 Promosi Layanan Kesehatan
- 445.9 Kasus Hukum Rumah Sakit
- 446 Tenaga Medis
 - 446.1 Perencanaan Tenaga Medis
 - 446.2 Pendayagunaan Tenaga Medis
 - 446.21 Perijinan untuk Tenaga Medis
 - 446.22 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
 - 446.23 TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)
 - 446.3 Diklat Tenaga Kesehatan/Medis
 - 446.4 Diklat Tenaga Kesehatan/Para Medis
 - 446.5 Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk pendidikan spesialis
- 447 Peralatan Kesehatan
 - 447.1 Standarisasi
 - 447.2 Penyimpanan
 - 447.3 Distribusi
 - 447.4 Perijinan berkaitan dengan Alat Kesehatan
- 448 Pengobatan Alternatif
 - 448.1 Pijat
 - 448.2 Akupunktur
 - 448.3 Jamu dan Herbal
 - 448.4 Dukun
- 449 Lembaga penyedia layanan kesehatan
 - 449.1 PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling
 - 449.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
 - 449.3 Rumah Bersalin
 - 449.4 Posyandu
 - 449.5 Laboratorium Kesehatan
 - 449.6 Apotik
 - 449.7 Sanatorium Kesehatan

- 450 AGAMA
 - 450.1 Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan *bidang keagamaan*
 - 450.2 Bantuan di Bidang keagamaan
- 451 Islam
 - 451.1 Peribadatan
 - 451.11 Sholat
 - 451.12 Zakat, Infak, Shodakoh
 - 451.13 Puasa
 - 451.14 Umroh dan Haji
 - 451.2 Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
 - 451.3 Tokoh Agama
 - 451.4 Pendidikan Agama
 - 451.41 Pendidikan Tinggi Agama
 - 451.42 Menengah, MTs, MA
 - 451.43 Dasar, Pra Sekolah, MI
 - 451.44 Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren Dll)
 - 451.45 Sarana pendidikan meliputi buku, gedung sekolah dll
 - 451.46 Tenaga Pengajar
 - 451.47 Dakwah (Pengajar, MTQ)
 - 451.5 Wakaf
 - 451.6 Mazhab Agama Islam
 - 451.7 Organisasi keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
 - 451.8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
- 452 Kristen Protestan
 - 452.1 Peribadatan
 - 452.2 Rumah Ibadah Gereja dll
 - 452.3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
 - 452.4 Mazhab Agama Kristen Protestan
 - 452.5 Organisasi Gerejani
- 453 Khatolik
 - 453.1 Peribadatan
 - 453.2 Rumah Ibadah Gereja dll
 - 453.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - 453.4 Mazhab Agama Khatolik
 - 453.5 Organisasi Gerejani
- 454 Hindu
 - 454.1 Peribadatan
 - 454.2 Rumah Ibadah Pura dll
 - 454.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - 454.4 Mazhab Agama Hindu
 - 454.5 Organisasi Agama Hindu
- 455 Budha
 - 455.1 Peribadatan
 - 455.2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
 - 455.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
 - 455.4 Mazhab Agama Budha
 - 455.5 Organisasi Agama Budha
- 456 Kong Hu Cu
 - 456.1 Peribadatan
 - 456.2 Rumah Ibadah Klenteng dll

- 456.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 456.4 Mazhab Agama Kong Hu Cu
- 456.5 Organisasi Agama Kong Hu Cu
- 460 SOSIAL
- 461 Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - 461.1 Cacat Ganda
 - 461.2 Cacat Fisik
 - 461.3 Cacat Mental
- 462 Rehabilitasi Sosial
 - 462.1 Gelandangan / orang terlantar, anak jalanan
 - 462.2 Pengemis
 - 462.3 Tuna Susila
 - 462.4 Anak Nakal
 - 462.5 Tuna Wisma
- 463 Kesejahteraan anak dan keluarga
 - 463.1 Kesejahteraan Anak
 - 463.11 Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
 - 463.12 Perlindungan Anak
 - 463.13 Anak Asuh
 - 463.2 Kualitas Hidup Perempuan
 - 463.21 Perlindungan Perempuan
 - 463.22 Ibu Teladan
 - 463.23 Pengarusutamaan Gender (PUG)
- 464 Kepirintisan dan Kepahlawanan
 - 464.1 Pahlawan meliputi Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
 - 464.2 Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada perintis kemerdekaan
 - 464.3 Cacat Veteran
- 465 Kesejahteraan Sosial
 - 465.1 Lanjut Usia
 - 465.2 Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
 - 465.3 Masyarakat miskin
 - 465.4 Penanggulangan Kemiskinan (Program : Raskin, PKH, BLT dll)
- 466 Sumbangan Sosial
 - 466.1 Korban Bencana
 - 466.11 Jaminan Sosial
 - 466.2 Pencarian dana untuk sumbangan: penyelenggaraan undian,
 - 466.3 Panti Asuhan
- 467 Bimbingan Sosial
 - 467.1 Masyarakat suku terasing meliputi: bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, pembinaan komunitas adat terpencil (PKAT) dan sebagainya
- 468 PMI
- 469 Makam
 - 469.1 Umum
 - 469.2 Pahlawan
 - 469.3 Khusus Keluarga Raja
 - 469.4 Krematorium
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 - 470.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kependudukan
- 471 Pendaftaran Penduduk
 - 471.1 Identitas Penduduk (WNI Asli/keturunan)

- 471.11 Biodata
- 471.12 Nomor Induk Kependudukan
- 471.13 Kartu Tanda Penduduk
- 471.14 Kartu Keluarga
- 471.15 Advokasi Identitas Penduduk
- 471.2 Perpindahan penduduk dalam wilayah Indonesia
- 471.21 Perpindahan Penduduk WNI
- 471.22 Perpindahan penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
- 471.23 Perpindahan penduduk WNA dan WNI tinggal sementara
- 471.24 Daerah Terbelakang
- 471.25 Bedol Desa
- 471.3 Perpindahan penduduk antar negara
- 471.31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
- 471.32 Orang asing tinggal sementara
- 471.33 Orang asing tinggal tetap
- 471.34 Perpindahan penduduk anatar negara di wilayah perbatasan
- 471.4 Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan
- 471.41 Akibat bencana alam
- 471.42 Akibat kerusakan sosial
- 471.43 Pendaftaran penduduk daerah terbelakang
- 471.44 pendaftaran penduduk
- 472 Pencatatan Sipil
 - 472.1 Kelahiran kematian dan advokasi
 - 472.11 Kelahiran
 - 472.12 Kematian
 - 472.13 Advokasi
 - 472.2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
 - 472.21 Perkawinan Agama Islam
 - 472.22 Perkawinan agama non Islam
 - 472.23 Perceraian agama islam
 - 472.24 Perceraian agama non islam
 - 472.25 Advokasi
 - 472.3 Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi
 - 472.31 Pengangkatan Anak
 - 472.32 Pengakuan Anak
 - 472.33 Pengesahan Anak
 - 472.34 Perubahan Akta
 - 472.35 Pembatalan Akta
 - 472.36 Advokasi
 - 472.4 Pencatatan Kewarganegaraan
 - 472.41 Akibat Perkawinan
 - 472.42 Akibat Kelahiran
 - 472.43 Non Kelahiran / Non Kelahiran
 - 472.44 Naturalisasi
 - 472.45 Perubahan WNI ke WNA
- 473 Informasi Kependudukan
 - 473.1 Teknologi Kependudukan
 - 473.2 Teknologi Informasi
 - 473.21 Pendaftaran Penduduk
 - 473.22 Kejadian Vital Penduduk
 - 473.23 Penduduk non registrasi
 - 473.3 Pelayanan informasi kependudukan

- 474 Perkembangan penduduk
 - 474.1 Pengarahan Kuantitas Penduduk
 - 474.11 Struktur Jumlah
 - 474.12 Komposisi
 - 474.13 Fertilitas
 - 474.14 Kesehatan Reproduksi
 - 474.15 Morbiditas Penduduk
 - 474.16 Mortalitas Penduduk
 - 474.2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
 - 474.21 Anak dan remaja
 - 474.22 Penduduk Usia Produktif
 - 474.23 Penduduk Lanjut Usia
 - 474.24 Gender
 - 474.3 Penataan Persebaran Penduduk
 - 474.31 Migrasi antar wilayah
 - 474.32 Urbanisasi
 - 474.4 Perlindungan dan pemberdayaan penduduk
 - 474.5 Pengembangan wawasan kependudukan
- 475 TRANSMIGRASI
 - 475.1 Penyiapan informasi daerah transmigrasi
 - 475.11 Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha di daerah *transmigrasi*
 - 475.12 Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi
 - 475.13 Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrasi
 - 475.14 Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi
 - 475.15 Publikasi Transmigrasi melalui pameran dan kesenian
 - 475.16 Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi
 - 475.17 Kerjasama di bidang transmigrasi
 - 475.18 Kepulangan transmigran karena daerah terjadi konflik
 - 475.2 Pemukiman transmigrasi
 - 475.21 Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi
 - 475.22 Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi
 - 475.23 Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi
 - 475.24 Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman
 - 475.25 Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum / social dan jaringan transportasi
 - 475.26 Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah
 - 475.27 Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi
 - 475.28 Tata ruang pemukiman transmigrasi
 - 475.281 Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
 - 475.282 Rancangan kapling TSM
 - 475.283 Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum
 - 475.284 Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah
 - 475.285 Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah
 - 475.286 pengukuran batas unit pemukiman

- 475.287 Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah
- 475.29 Sarana pemukiman transmigrasi
- 475.291 Pembinaan dan pengadiln, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum
- 475.292 Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih
- 475,293 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi
- 475,294 Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana
- 475,295 Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan
- 475.3 Pengerahan, pemindahan dan penempatan
- 475.31 Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan
- 475.32 Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan
- 475.33 Pengerahan
- 475.331 Pendaftaran dan seleksi calon transmigran
- 475.332 Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran
- 475.333 Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan
- 475.34 Pemberangkatan transmigran
- 475.341 Pengangkutan transmigran melalui laut, udara dan darat
- 475.342 Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan
- 475.343 Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan
- 475.344 Pengawasan perjalanan transmigran
- 475.345 Pengaturan rute pemberangkatan
- 475.346 Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan
- 475.35 Penempatan transmigran
- 475.351 Kesiapan lokasi dan daya tampung
- 475.352 Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina
- 475.353 Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT
- 475.354 Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti
- 475.4 Penampungan transmigrasi (*transito*), dan pelatihan
- 475.41 Pelatihan transmigran
- 475.411 Program pengajaran dan metode pelatihan
- 475,412 Penyusunan silabus dan modul pelatihan
- 475.413 Penyusunan calon peserta/pelatih
- 475.42 Penampungan transmigran di *transito*
- 475.421 Pelayanan kesehatan bagi transmigran
- 475.422 Pelayanan makanan bagi transmigran
- 475.423 Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran
- 475.5 Pembinaan masyarakat transmigran
- 475.51 Identifikasi dan penjagaan pembinaan
- 475.511 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian
- 475.512 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan
- 475.513 Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan
- 475.52 Pembinaan Pendidikan
- 475.521 Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan
- 475,522 Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status
- 475.53 Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat
- 475.54 Pembinaan kesehatan

- 475,541 Penyediaan sarana kesehatan dan KB
- 475.542 Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa
- 475.543 Pendistribusian bantuan pangan
- 475.55 Pembinaan Rokhani
- 475.551 Bimbingan mental spritual dan penyediaan petugas agama
- 475.552 Bimbingan adaptasi masyarakat
- 475.553 Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial
- 475.56 Pelayanan pos di daerah transmigrasi
- 475.57 Penyerahan UPT yang layak untuk di serahkan
- 475.58 Penilaian transmigran teladan
- 475.59 Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha
- 476 KELUARGA BERENCANA
 - 476.1 Alat Kontrasepsi
 - 476.2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
 - 476.3 Penyuluh Lapangan KB (PLKB)
 - 476.4 Pos KB Desa
 - 476.5 Akseptor KB
- 480 MEDIA MASSA
 - 480.1 Kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang media massa
- 481 Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
 - 481.1 Surat Kabar
 - 481.2 Majalah
 - 481.3 Buletin
 - 481.4 Jurnal
 - 481.5 Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
 - 481.51 Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok
 - 481.52 Perekonomian dan perbankan
 - 481.53 Bidang lainnya
 - 481.6 Layanan informasi/Leaflet
 - 481.7 Masukan analisis Gubernur
- 482 Media elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran
 - 482.1 Radio
 - 482.2 Televisi
 - 482.3 Film Dokumenter
 - 482.4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
 - 482.5 Kelompok Pemantau isi Siaran
 - 482.6 Pengkajian Isi Siaran
 - 482.7 SDM Penyiaran
- 483 Periklanan
 - 483.1 Ketentuan Pemasangan Reklame
 - 483.2 Pameran
- 484 Kewartawanan/jurnalistik
 - 484.1 Pembentukan Organisasi Profesi
 - 484.2 Kasus-kasus Kewartawanan
 - 484.3 Penyalahgunaan Profesi
 - 484.4 Bantuan kepada/dari organisasi Profesi Wartawan
 - 484.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
 - 484.6 Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan
 - 484.7 Temu pers/konferensi Pers
 - 484.8 Pers Tour
 - 484.9 Kunjungan Wartawan Asing

- 485 Penyuluhan Masyarakat
 - 485.1 Publikasi
 - 485.2 *Pendirian information center*
- 486 Pembinaan bidang infokom
 - 486.1 Training Fotografi
 - 486.2 Training Berita Jurnalistik
 - 486.3 Bintek Infokom
 - 486.4 Rakorda Infokom
 - 486.5 Rakor Pengendalian Kegiatan
 - 486.6 Pengelolaan website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- 487 Hubungan Antar Lembaga
 - 487.1 Non Pemerintah
 - 487.11 Wahana Komunikasi Masyarakat
 - 487.12 Lembaga Komunikasi Masyarakat
 - 487.2 Lembaga Pemerintah
 - 487.21 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
 - 487.22 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
 - 487.3 Luar Negeri
 - 487.31 Promosi Luar Negeri
 - 487.32 Kunjungan Wartawan Asing
- 488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
- 489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
 - 489.1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
 - 489.2 Dialog Interaktif
 - 489.3 Rubrik
 - 489.4 Materi/pointers sambutan, paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan dialog interaktif
 - 489.5 Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan
- 500 PEREKONOMIAN
 - 500.1 Dewan Stabilisasi
 - 501 Pengadaan Pangan
 - 502 Pengadaan Sandang
 - 503 Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, klasifikasi pada masalahnya
 - 510 PERDAGANGAN
 - 510.1 Promosi Perdagangan
 - 510.11 Pekan raya
 - 510.12 Iklan
 - 510.13 Pameran
 - 510.14 Event-event
 - 510.15 Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)
 - 510.2 Pelelangan, distribusi
 - 510.21 Pemasaran Sembako
 - 510.22 Pemasaran Hasil Industri
 - 510.23 Penentuan harga pokok
 - 510.3 Bina usaha dan sarana perdagangan
 - 510.31 Rencana dan program kerja
 - 510.32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - 510.33 Pelaksanaan Teknis
 - 510.34 Pemantauan

- 510.35 Evaluasi dan Pelaporan
- 510.4 Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)
- 510.41 Penerbitan SIUP
- 510.42 Perpanjangan
- 510.43 Ijin Prinsip
- 510.44 Rekomendasi
- 510.5 Perdagangan antar pulau
- 510.51 Kerjasama bahan baku
- 510.52 Industri pemasaran
- 510.53 Kontrak
- 510.6 Tera
- 510.61 Tera dan Tera Ulang
- 510.62 Takaran
- 510.63 Timbangan dan anak timbangan
- 510.64 Kalibrasi
- 510.65 Cap tanda tera
- 510.66 Biaya tera
- 510.7 Bantuan Peralatan
- 510.71 Proposal
- 510.72 Surat Perjanjian/kontrak
- 510.73 Serah terima
- 510.8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
- 510.9 Kemetrolgian
- 510.91 Standart Tingkat Tiga
- 510.92 Standart Kerja Satuan Ukuran
- 510.93 Ukuran Metrologi
- 510.931 Peralatan
- 510.932 Laboratorium Metrologi Legal
- 510.933 Tanki Ukur Mobil
- 510.934 Meter Taxi
- 510.935 KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM
- 510.936 SPBU
- 511 Pemasaran
 - 511.1 Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun, dll
 - 511.2 Pasar
 - 511.3 Pertokoan, kaki lima, kios
 - 511.4 Pusat perbelanjaan
- 512 Ekspor
 - 512.1 Ekspor Hasil Industri
 - 512.2 Ijin Ekspor
 - 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - 512.4 Managemen Perdagangan Internasional
 - 512.5 Eksport Hasil Industri
 - 512.51 Kebijakan
 - 512.52 Pemasaran
 - 512.6 Pemberitahuan Eksport Barang
 - 512.7 Pengawasan Mutu Barang
 - 512.8 Eksportir Terdaftar
 - 512.9 Evaluasi dan pelaporan
- 513 Impor
 - 513.1 Ijin Impor
 - 513.11 Pemberian Ijin

- 513.12 Pengendalian Ijin
- 513.2 Standart Mata Dagang Import
- 513.3 *Management Perdagangan Internasional*
- 513.4 Kegiatan Import
- 513.41 Pembinaan Import
- 513.42 Pengendalian Import
- 513.43 Pemantauan Import
- 513.5 Faktor-faktor Pendukung
- 513.6 Pengawasan Mutu Barang Import
- 513.7 Penyaluran Kegiatan Import
- 513.71 Bahan Konsumsi
- 513.72 Bahan Baku
- 513.73 Bahan Penolong
- 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import
- 514 Perdagangan antar pulau
 - 514.1 Kerjasama Bahan Baku
 - 514.2 Industri Pemasaran
 - 514.3 Kontrak
- 515 Pengembangan Potensi Pergadangan Luar Negeri
 - 515.1 Promosi dan Informasi
 - 515.2 Pameran
 - 515.3 Kerjasama
- 516 Pergudangan, termasuk tangki penyimpanan minyak goreng
 - 516.1 Peti Kemas
 - 516.2 Tangki Penyimpangan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 **KOPERASI**
 - 518.1 Bina Usaha Koperasi
 - 518.11 Koperasi Pertanian
 - 518.12 Koperasi Non Pertanian
 - 518.13 Permodalan Koperasi
 - 518.131 Pemupukan Modal
 - 518.132 Pemanfaatan Modal
 - 518.133 Perbankan dan Asuransi
 - 518.134 Permodalan Luar Koperasi
 - 518.135 Kredit Program Umum
 - 518.136 Kredit Program Khusus
 - 518.14 Distribusi dan Jasa Koperasi
 - 518.141 Distribusi Bahan Pokok
 - 518.142 Distribusi Aneka Bahan
 - 518.143 *Distribusi Kerjasama Niaga*
 - 518.144 Jasa Angkutan
 - 518.145 Jasa Perumahan
 - 518.146 Aneka Jasa
 - 518.15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi
 - 518.2 Bina Lembaga Koperasi
 - 518.21 Organisasi Koperasi
 - 518.211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
 - 518.212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
 - 518.213 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
 - 518.214 Keragaan Koperasi
 - 518.215 Pengakuan Koperasi Sekolah
 - 518.216 Amalgamasi

	518,217	Tertib Organisasi Koperasi
	518.218	Penyelesaian Penyelisian / Persengketaan
	518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
	518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
	518.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
	518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
	518.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
	518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
	518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
	518.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
	518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
	518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
	518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
	518.241	Administrasi Koperasi Pedesaan
	518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
	518.243	Karyawan/Manager Koperasi
	518.244	Sumber Daya Manusia
	518.245	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
	518.246	Penyaluran Alat Sekolah
	518,247	Bantuan Pemda Kepada Koperasi/KUD
	518.25	Akuntansi
	518.251	Akuntansi Koperasi Pedesaan
	518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
	518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
	518.26	Pengawasan Koperasi
	518.261	Pengawasan Koperasi Primer
	518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
	518.263	Koperasi Jasa Audit
	518.264	Kerjasama Kantor Akuntan
	518.27	Penyuluhan Koperasi
	518.271	Pembinaan Kader Koperasi
	518.272	Masyarakat Umum
	518.273	Forum Komunikasi
	518.274	Kelompok Tani
	518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
	518,276	Penilaian Tingkat Nasional
	518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
	518.31	Pembinaan Usaha
	518.311	Pembinaan Usaha Mikro
	518.312	Pembinaan Usaha Kecil
	518.313	Pembinaan Usaha Menengah
	518.32	Pengawasan Usaha
	518.321	Pengawasan Usaha Mikro
	518.322	Pengawasan Usaha Kecil
	518.323	Pengawasan Usaha Menengah
520		PERTANIAN
521		Tanaman Pangan
	521.1	Rencana dan program
	521.11	Bimas/Inmas Termasuk Kredit
	521.12	Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
	521.2	Produksi
	521.21	Padi

- 521.22 Palawija
- 521.23 Hortikultura (sayuran, Buah-buahan, tanaman hias)
- 521.24 Panen Gagal (Puso)
- 521.3 Sarana Usaha Pertanian
- 521.31 Peralatan
- 521.32 Meliputi Traktor dan sebagainya
- 521.33 Pembenihan dan Pembibitan
- 521.34 Pupuk
- 521.35 Irigasi Pertanian
- 521.36 Rehabilitasi Lahan Pertanian
- 521.4 Perlindungan Tanaman
- 521.41 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman pangan
- 521.411 Hama Tanaman pangan
- 521.412 Pemberantas
- 521.42 Pestisida
- 521.421 Agensi Pengendalian Hayati
- 521.422 Tanah Pertanian Pangan
- 521.43 Persawahan
- 521.431 Perladangan
- 521.432 Kebun
- 521.433 Pengusaha, Petani
- 521.5 Lahan Kritis
- 521.6 Pemasaran dan Promosi Pertanian
- 521.7 Pengembangan Sumber Daya Pertanian
- 522 KEHUTANAN
- 522.1 Perencanaan Hutan
- 522.11 Survey
- 522.111 survey PPA
- 522.112 Survey Areal
- 522.113 Survey Pembinaan Hutan
- 522.114 Survey Potensi Hutan
- 522.12 Pendataan/Inventarisasi Areal Hutan
- 522.121 Data Areal Tata Guna Hutan
- 522.122 Data Areal Konservasi
- 522.2 Tata Guna Hutan
- 522.21 Tata Ruang Kawasan
- 522.211 Pengurusan Kawasan Hutan
- 522.212 Penafsiran Hutan
- 522.213 Mutasi Hutan
- 522.22 Tata Hutan
- 522.221 Tata Hutan Sementara
- 522.222 Tata Hutan Tetap
- 522.223 Pembukaan Hutan
- 522.23 Pengukuran dan Pemetaan
- 522.3 Pengusahaan Hutan
- 522.31 Data Areal HPH
- 522.311 SK HPH
- 522.312 Kerja Sama
- 522.313 Pembatalan/Penolakan
- 522.32 Modal dan Peralatan
- 522.321 Inventarisasi Logging
- 522.322 Inventarisasi Industri
- 522.323 Peralatan

- 522.324 Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
- 522.325 Pemegang Saham
- 522.326 Neraca Perusahaan
- 522.33 Rencana kerja
- 522.331 KHPH
- 522.332 RKPH
- 522.34 Perpanjangan HPH
- 522.35 Produksi
- 522.351 Target Produksi
- 522.352 Produksi Kayu
- 522.353 Produksi Non Kayu
- 522.36 Industri
- 522.361 Industri Kayu HPH
- 522.362 Industri Kayu Non HPH
- 522.363 Industri Non Kayu
- 522.37 Pembinaan HPH
- 522.371 Pelanggaran dan Sanksi
- 522.38 Pembangunan Hutan Tanaman Industri
- 522.381 Hutan Tanaman Industri Pulp
- 522.382 HTI Pertukaran
- 522.39 Iuran Hutan
- 522.4 Sarana Usaha Pertanian
- 522.41 Standarisasi
- 522.411 Kayu
- 522.412 Non Kayu
- 522.42 Pengujian Hasil Hutan
- 522.43 Pengembangan
- 522.431 Pengembangan Perusahaan
- 522.432 Pengembangan Pemasaran
- 522.44 Pemasaran Hasil Hutan
- 522.45 SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
- 522.451 Sarana dan Prasarana
- 522.452 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
- 522.46 Tata Usaha Hasil Hutan
- 522.47 PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
- 522.5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
- 522.51 Konservasi Jenis
- 522.511 Satwa yang dilindungi
- 522.512 Satwa yang tidak dilindungi
- 522.513 Lembaga Konservasi Satwa
- 522.514 Lembaga Konservasi Tumbuhan
- 522.52 Kawasan Konservasi
- 522.521 Cagar Alam (termasuk laut)
- 522.522 Suaka Margasatwa
- 522.523 Taman Wisata (termasuk laut)
- 522.524 Taman Nasional
- 522.525 Taman Hutan Raya / Kebun Raya
- 522.526 Taman Baru
- 522.527 Hutan Lindung
- 522.53 Pengkajian Lingkungan
- 522.531 Amdal UKL, UPL, di Dalam Kawasan
- 522.532 Amdal UKL, UPL, di Luar Kawasan

- 522.54 Bina Cinta Alam
- 522.541 Kelompok Pecinta Alam
- 522.542 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
- 522.543 Penyuluhan konservasi Sumber Daya Alam
- 522.544 LSM Lingkungan
- 522.55 Pengamanan Hutan
- 522.551 Jaga Wana
- 522.552 PPNS
- 522.553 Gangguan Keamanan Hutan
- 522.554 Bencana Alam
- 522.555 Kebakaran Hutan
- 522.556 Sengketa Hutan
- 522.557 Hama dan Penyakit
- 522.558 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
- 522.559 Alat dan Mesin Kehutanan
- 522.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
- 522.61 Pembenihan
- 522.611 Tegakan Benih
- 522.612 Pengadaan Benih
- 522.613 Pengujian dan Penyimpanan Benih
- 522.614 Lalu Lintas Angkutan Benih
- 522.615 Pembibitan
- 522.616 Pengada dan Pengekar Bibit Bersertifikat
- 522.617 Pengada dan Pengekar Bibit tidak Bersertifikat
- 522.62 Tanaman Reboisasi
- 522.621 Lahan Kritis
- 522.622 Reboisasi Lahan HPH
- 522.623 Reboisasi Tanah Hutan
- 522.624 Konservasi Tanah dan Air
- 522.625 Pengendalian Perladangan
- 522.626 Penghijauan
- 522.627 Aneka Usaha Kehutanan
- 522.63 Perhutanan Sosial
- 522.631 Sutra Alam
- 522.632 Minyak Kayu Putih
- 522.633 Perlebaran
- 522.7 Hutan Produksi
- 522.71 Hutan Produksi Terbatas
- 522.72 Hutan Produksi yang dapat dikonservasi
- 522.8 Kawasan Lindung
- 523 PERIKANAN DAN KELAUTAN
- 523.1 Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan
- 523.11 Penyuluhan
- 523.12 Teknologi
- 523.2 Produksi Perikanan
- 523.21 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
- 523.22 Perikanan Budidaya: CBIB, CBIC
- 523.23 Sertifikasi Kesehatan Ikan
- 523.3 Usaha Perikanan
- 523.31 Pelatihan Nelayan
- 523.32 Pembinaan Wanita Nelayan
- 523.33 Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI, SKP

- 523.34 Perbenihan
- 523.4 Pemasaran dan Pengelolaan hasil perikanan
- 523.41 Ekspor Hasil Perikanan
- 523.42 Impor Hasil Perikanan
- 523.43 Pemasaran Dalam Negeri
- 523.44 Pengusaha Perikanan
- 523.5 Sarana Perikanan
- 523.51 Pelabuhan Perikanan Pantai
- 523.52 TPI/PPI
- 523.53 Kesyahbandaran
- 523.54 Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb
- 523.6 Pengendalian hama dan penyakit
- 523.61 Penyakit Ikan
- 523.62 Hama Ikan
- 523.63 Obat-obatan termasuk sertifikasinya
- 523.7 Konservasi dan Suaka Laut
- 523.71 Transplantasi bibit karang
- 523.72 Terumbu Karang
- 523.73 Mangrove
- 523.74 Garam
- 523.75 Harta karun di dalam laut
- 523.76 Pembenihan/Pendidikan masyarakat pesisir
- 524 **PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**
- 524.1 Produksi
- 524.11 Perbibitan
- 524.12 Penyebaran dan pengembangan peternakan
- 524.13 Budidaya
- 524.2 Usaha Peternakan
- 524.21 Pelayanan Usaha
- 524.22 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 524.23 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
- 524.3 Kesehatan Hewan
- 524.31 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
- 524.32 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- 524.33 Obat-obat Hewan
- 524.34 Pelayanan Kesehatan Hewan
- 524.4 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- 524.41 Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
- 524.42 Hygieni dan Sanitasi
- 524.43 Produk Hewani
- 524.5 Laboratorium Kesehatan Hewan
- 524.51 Pengujian Mutu Asal Hewan
- 524.52 Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
- 524.6 Inseminasi Buatan
- 524.61 Produksi Distribusi dan Pemasaran
- 624.62 Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
- 524.7 Pembibitan dan Budi Daya Ternak
- 524.71 Ternak Non Ruminansia
- 524.72 Ternak Ruminansia
- 525 **PERKEBUNAN**
- 525.1 Program dan Pelaporan
- 525.11 Pelaporan
- 525.12 Monitoring

- 525.13 Statistik Perkebunan
- 525.2 Produksi
 - 525.21 Karet
 - 525.22 Teh
 - 525.23 Tembakau
 - 525.24 Tebu
 - 525.25 Cengkeh
 - 525.26 Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
 - 525.27 Kopi
 - 525.28 Kakao
 - 525.29 Jenis Tanaman yang lain
- 525.3 Usaha Perkebunan
 - 525.31 Benih
 - 525.32 Pembibitan
 - 525.33 Kelompok Tani
 - 525.34 Kemitraan
 - 525.35 Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
 - 525.36 Pemasaran Hasil Perkebunan
- 525.4 Perlindungan Tanaman
 - 525.41 Hama
 - 525.42 Pestisida
 - 525.43 Agensia Pengendalian Hayati
- 525.5 Alat dan Mesin Perkebunan
 - 525.51 Power Sprayer
 - 525.52 Hand Sprayer
 - 525.53 Polibag
 - 525.54 *Alat Laboratorium Perkebunan*
 - 525.55 Reagen
 - 525.56 Sarana/alat Produksi Perkebunan
- 525.6 Pengolahan Lahan
 - 525.61 Terasering
- 525.7 Pemasyarakatan
 - 525.71 Penyuluhan
 - 525.72 Sosialisasi
 - 525.73 Informasi
- 526 KETAHANAN PANGAN
 - 526.1 Program Bimbingan Massal
 - 526.2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - 526.21 Pembinaan Teknologi
 - 526.22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - 526.23 Kelembagaan
 - 526.3 Agribisnis
 - 526.31 Mutu Hasil
 - 526.32 Pengelola Hasil pangan
 - 526.33 Pemasaran hasil
 - 526.34 Kementriaan
 - 526.4 Distribusi Pangan
 - 526.41 Sistem dan Pola Distribusi
 - 526.42 Sarana dan Prasarana Distribusi
 - 526.43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
 - 526.5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
 - 526.51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
 - 526.52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

	526.53	Sistem Informasi Pangan
527		PENYULUHAN
	527.1	Sumber Daya Manusia
	527.11	Penyuluh
	527.12	Pelaku Utama Pelaku Usaha
	527.13	Stake Holder
	527.2	Kelembagaan
	527.21	Struktural
	527.22	Non Struktural
	527.23	Pelaku Utama Pelaku Usaha
	527.24	Lembaga Profesi
	527.3	Penyelenggaraan Penyuluhan
	527.31	Program/Metode
	527.32	Promosi/pameran/kampanye
	527.33	Penghargaan/lomba
	527.34	Materi
530		PERINDUSTRIAN
	530.1	Undang-undang Gangguan
531		Industri Logam
532		Industri Mesin/Elektronik
533		Industri Kimia/Farmasi
534		Industri Tekstil
535		Industri Makanan/Minuman
536		Aneka Industri/Perusahaan
	536.1	Home Industri
537		Aneka Kerajinan
	537.1	Kerajinan Rakyat
538		Usaha Negara
	538.1	Perjan
	538.2	Perum
	538.3	Persero
539		Perusahaan Daerah
540		ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541		Minyak dan Gas Bumi
	541.1	Pengusahaan
	541.11	Perijinan
	541.12	Rekomendasi
	541.13	Kontrak Karya
	541.14	Pengolahan
	541.2	Penyaluran
	541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542		Energi
	542.1	Energi Alternatif
	542.11	Gas Rawa
	542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
	542.13	Biogas
	542.14	Energi Baru terbarukan
	542.15	Perijinan
	542.16	Rekomendasi
	542.17	Pembinaan dan Pengawasan
	542.2	Konservasi Energi
	542.3	Pemetaan Energi
	542.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)

- 543 Pertambangan, mineral dan batubara
 - 543.1 Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
 - 543.11 WIUP Batuan
 - 543.12 WIUP Bukan Logam
 - 543.13 WIUP Logam
 - 543.14 WIUP Batubara
 - 543.2 Rekomendasi Teknis
 - 543.3 Perijinan
 - 543.31 IUP Eksplorasi
 - 543.32 IUP Operasi Produksi
 - 543.33 IUP Operasi Produksi Khusus
 - 543.34 Ijin Usaha Jasa Pertambangan
 - 543.35 Pencabutan Ijin
 - 543.4 Pembinaan
 - 543.5 Pengawasan
 - 543.51 Pengawasan Usaha Pertambangan
 - 543.52 Penerbitan Kegiatan Pertambangan
 - 543.6 Pasca Tambang
 - 543.61 Reklamasi
 - 543.62 Penutupan
- 544 Air Tanah
 - 544.1 Cekungan Air Tanah (CAT)
 - 544.11 Pemetaan CAT
 - 544.12 Imbuhan CAT
 - 544.13 Lepasan CAT
 - 544.14 Konservasi
 - 544.15 Pengendalian Daya Rusak
 - 544.2 Rekomendasi Teknis
 - 544.3 Sumur Artesis
 - 544.4 Sumur Bor
 - 544.5 Sumur Gali (Pasak)
 - 544.6 Pengusaha Pengebor (APATINDO)
 - 544.7 Sumur Pantau
 - 544.8 Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air
 - 544.9 Hidrologi
- 545 Geologi
 - 545.1 Pemetaan
 - 545.2 Mitigasi Bencana Geologi
 - 545.3 Vulkanologi
 - 545.31 Pengawasan Vulkanologi
 - 545.32 Panas Bumi
 - 545.4 Hidrogeologi
 - 545.5 Gerakan tanah (longsoran, amblesan)
 - 545.6 Pengawasan, Pengendalian
- 546 Hidrologi
- 547 Kesamudraan
- 548 Penghematan Energi
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
 - 551.1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
 - 551.11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
 - 551.12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (keur)
 - 551.13 Kecelakaan Lalu Lintas

551.2	Angkutan Jalan Raya
551.21	Perizinan
551.22	Terminal
551.23	Alat Angkutan
551.24	Jembatan Timbang / Lebih Muatan
551.25	Uji Mutu
551.3	Angkutan Sungai
551.31	Keselamatan, Rambu-rambu
551.32	Lalu Lintas
551.33	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.34	Trayek
551.35	Sarana/Kapal
551.36	Pelabuhan
551.37	Terminal
551.38	Kecelakaan
551.39	Perizinan
551.4	Angkutan Danau
551.41	Keselamatan, Rambu-rambu
551.42	Lalu Lintas
551.43	Alur dan Kolam Pelabuhan
551.44	Trayek
551.45	Sarana/Kapal
551.46	Pelabuhan
551.47	Terminal
551.48	Kecelakaan
551.49	Perizinan
551.5	Perkereta-Apian
551.51	Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
551.52	Prasarana (Jalan/Jembatan)
551.53	Trayek
551.54	Angkutan Penumpang
551.55	Angkutan Barang
551.56	Keselamatan
551.57	Kecelakaan
551.58	Perawatan/Perbaikan
551.59	Perizinan
552	Perhubungan Laut
552.1	Lalu Lintas Angkutan Laut
552.11	Pelayaran Dalam Negeri
552.12	Pelayaran Luar Negeri
552.13	Pelayaran Haji
552.14	Pelayaran Charter/Wisata Turis
552.15	Pelayaran Khusus
552.16	Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu
552.2	Perkapan-Alat Angkutan
552.21	Kapal Penumpang
552.22	Kapal Barang
552.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
552.24	Kapal Tanker
552.25	Ponton/Tongkong
552.26	Kapal Layar
552.27	Kapal Layar Motor
552.28	Kapal Kontainer

- 554.11 Kebutuhan Fasilitas
- 554.12 Rehabilitasi / Perawatan
- 554.13 Bina Usaha / Pengawasan / Penertiban
- 554.14 Standarisasi Perangkat
- 554.15 Tanah / Bangunan
- 554.16 Filateli
- 554.17 Asosiasi
- 554.18 Laporan dan Evaluasi
- 554.2 Pelayanan
- 554.21 Jasa Pos
- 554.22 Jasa Titipan
- 554.23 Jasa Giro
- 554.24 Benda Pos / Perangko
- 554.25 Sampul Peringatan
- 554.26 Jasa Pos Elektronik
- 554.3 Perijinan
- 554.31 Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan
- 554.32 Pembukaan Agen / Cabang
- 554.4 Gangguan Sarana / Prasarana
- 554.41 Kecelakaan
- 554.42 Sabotase
- 554.43 Penyelundupan
- 555 Teknologi Informasi
- 555.1 Kebijakan
- 555.2 Peralatan
- 555.21 Telepon
- 555.22 Internet / USO
- 555.23 Telegram, Telex / SBB, Faximile
- 555.24 Satelit, Stasiun Bumi
- 555.25 Radio Komunikasi
- 555.3 Sistem
- 555.4 Pembinaan / Penertiban
- 555.5 Perijinan
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
- 556.1 Usaha Pariwisata
- 556.11 Usaha Jasa Pariwisata
- 556,111 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
- 556,112 Restoran dan Rumah Makan
- 556.12 Izin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
- 556.13 Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556.14 Usaha Sarana Pariwisata
- 556,141 Ijin Pariwisata
- 556,142 Ijin Usaha Pariwisata
- 556,143 Ijin Usaha Jasa Pariwisata
- 556,144 Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556,145 Ijin Usaha Sarana
- 556.15 Wisatawan
- 556,151 Wisatawan Nusantara
- 556,152 Wisatawan Mancanegara
- 556.16 Promosi dan Informasi Pariwisata
- 556.161 Dalam Negeri
- 556.162 Luar Negeri
- 556.2 Perhotelan

556.21	Status Hotel
556.22	Kelas Hotel
556.23	Tarif
556.3	Travel Service
556.31	Pramu Wisata
556.32	Biro Perjalanan / Angkutan Wisata
556.33	Souvenir
556.34	Kemudahan Wisata (Visa, Bea, Cukai, Karantina)
556.4	Tempat Rekreasi
556.41	Obyek dan Daya Tarik Wisata
556.411	Ciptaan Tuhan
556.412	Hasil Karya Manusia
556.42	Rehabilitasi / Perawatan
556.43	Pengembangan Fasilitas
556.44	Tanah / Bangunan
556.45	Bina Usaha
556.46	Insitusi
556.461	Asosiasi
556.462	Lembaga Kepariwisataaan
557	Metereologi
557.1	Curah Hujan
557.2	Hujan Buatan
557.3	Peneropongan Bintang
560	TENAGA KERJA
560.1	Data Permintaan TKI / TKW dari Luar Negeri
560.11	Data Persediaan TKI / TKW dari Daerah
560.2	<i>Job Order</i> TKI ke Luar Negeri oleh PJTKI
560.3	Rekrutmen Calon TKI / TKW
560.4	Seleksi Naker ke Luar Negeri
560.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW
560.42	Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW
560.43	Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW
560.5	Persyaratan Naker TKI / TKW
560.51	Permohonan Rekomendasi Passport
560.52	Perjanjian Kerja TKI / TKW
560.53	Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
560.54	Permohonan Fiskal ke Luar Negeri
560.55	Pelatihan TKI / TKW
560.6	Pemberangkatan Naker
560.61	Pemberangkatan ke Luar Negeri
560.62	<i>Pembekalan Akhir</i> Pemberangkatan TKI / TKW ke Luar Negeri
560.63	Berita Serah Terima TKI / TKW
560.7	Pemulangan Naker
560.71	Kepulangan TKI / TKW Karena Kontraknya Habis
560.72	Pemulangan TKI/TKW Ilegal
560.73	TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
561	Upah
561.1	Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah / Nasional
561.2	Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten / Kota dan Provinsi
561.3	Kebutuhan Fisik Minuman
561.4	Perhitungan Upah Kerja (termasuk disalamnya upah lembur)

- 561.5 Laporan Data Remintace
- 561.6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
- 562 Penempatan
 - 562.1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
 - 562.11 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
 - 562.12 Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
 - 562.13 Pengembangan Kesempatan Berusaha / Peluang Kerja
 - 562.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
 - 562.3 Lembaga Penyalur Naker
 - 562.31 Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal / Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN)
 - 562.32 Data Evaluasi Kinerja Pneyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI / BKS /BKK)
 - 562.33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
- 563 Latihan Kerja
 - 563.1 Pendidikan Pekerja
 - 563.11 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - 563.12 Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
 - 563.13 Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)
 - 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
 - 563.21 Tempat Pelatihan (BLK)
 - 563.22 Instruktur / Pelatihan
 - 563.23 Modul / Silabus dan Bahan Praktek
 - 563.24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
 - 563.25 Sertifikat
 - 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
 - 564.1 Butsi
 - 564.2 Padat Karya
- 565 Perselisihan Pekerja
 - 565.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
 - 565.11 Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER
 - 565.12 Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER
 - 565.13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER
 - 565.14 Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER
 - 565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
 - 565.16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD / P4P)
 - 565.17 Permintaan Eksekusi Terhadap hasil keputusan KP2K (PAD / P4P)
 - 565.18 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD / P4P)
 - 565.2 Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja
- 566 Keselamatan Kerja
 - 556.1 Instalasi Proteksi Kebakaran
 - 556.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
 - 556.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja
 - 556.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
 - 556.5 Pelatihan / Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
 - 556.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
 - 556.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
 - 556.8 Perlengkapan Sarana Kerja

- 566.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/angkut)
- 566.82 Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel Uap)
- 566.83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- 566.84 Pemasangan dan Pemakaian Tangki tak Bertekanan
- 566.85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
- 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam Hari (sifht malam)
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
 - 567.1 Pengaduan PHK Sepihak
 - 567.2 PHK Masal
 - 567.3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
 - 567.4 Ijin Melakukan PHK
 - 567.5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
 - 567.6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK
 - 567.7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK
- 568 Kesejahteraan Pekerja
 - 568.1 Bantuan Kredit / bantuan Modal Kerja bagi Naker
 - 568.1.1 *Pemilihan Pekerja Teladan*
 - 568.2 Perumahan Pekerja
 - 568.3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
 - 568.4 Koperasi Pekerja
 - 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
 - 568.6 Perpustakaan Pekerja
 - 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
 - 568.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
 - 568.9 Pendirian, Pendaftaran dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
 - 568.9.1 Lembaga Kerjasama Bipartid
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
 - 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
 - 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
 - 569.4 *Perjanjian Kerja dengan Negara Asing*
 - 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
 - 569.6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
 - 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
 - 569.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
 - 569.9 *Tenaga Kerja Asing Ilegal*
- 570 PENANAMAN MODAL
 - 570.1 Penanaman Modal Dalam Negeri
 - 570.2 Penanaman Modal Asing
- 571 Modal Patungan (joint venture / penyertaan modal)
- 572 Pasar Uang dan Modal
- 573 Saham
- 580 PERBANKAN MONETER
- 581 Kredit
- 582 Investasi
- 583 Tabungan
 - 583.1 Deposito
 - 583.2 Tabanas
 - 583.3 Taska
 - 583.4 Tapelpram
- 584 Bank Pembangunan Daerah
 - 584.1 Bank Jateng
 - 584.2 BKK, BPR BKK, Bank Pasar

585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan
586	Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer
587	Fiscal
588	Hutang Negara Obligasi
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tata Guna Tanah
591.1	Pemetaan dan Pengukuran
591.2	Perpetaan
591.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
591.4	Fakta Tata Guna Tanah
591.5	Tanah Kritis
592	Landreform
592.1	Redistribusi
592.11	Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
592.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform
592.13	Pembagian Tanah Landreform
592.14	Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
592.2	Ganti Rugi
592.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.22	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
592.23	Ganti Rugi Tanah Absentee
592.24	Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
592.25	Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.26	Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
592.3	Bagi Hasil
592.31	Penetapan Imbangan Gadai Tanah
592.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
592.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
592.4	Gadai Tanah
592.41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
592.42	Pelaksanaan Gadai Tanah
592.43	Sengketa Gadai Tanah
592.5	Bimbingan dan Penyuluhan
592.6	Pengembangan
592.7	Yayasan Dana Landreform (YDL)
593	Pengurusan Hak-hak Tanah
593.1	Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis
593.11	Sewa Tanah
593.12	Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus
593.2	Hak Milik
593.21	Perorangan
593.22	Badan Hukum
593.3	Hak Pakai
593.31	Perorangan
593.311	Warga Negara Indonesia
593.312	Warga Negara Asing

593.32	Badan Hukum
593.321	Badan Hukum Indonesia
593.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
593.33	Tanah Gedung-gedung Negeri
593.4	Guna Usaha
593.41	Perkebunan Besar
593.42	Perkebunan Rakyat
593.43	Peternakan
593.44	Perikanan
593.45	Kehutanan
593.5	Hak Guna Bangunan
593.51	Perorangan
593.52	Badan Hukum
593.53	P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
593.54	Badan Hukum Asing Belanda - PBK No. 5/56
593.55	Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)
593.6	Hak Pengelolaan
593.61	PN Perumnas, Bonded Were House, Industrial Estate, Real Estate
593.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
593.7	Sengketa Tanah
593.71	Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
593.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
593.81	Pencabutan Hak
593.82	Pembebasan Tanah
593.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
594.1	Pengukuran/Pemetaan
594.11	Fotogrametri
594.12	Terristris
594.13	Triangulasi
594.14	Peralatan
594.2	Dana Pengukuran (Permen Agraria No. 6/1960)
594.3	Sertifikat
594.4	Pejabat Pembuatan Akte Tanah
595	Transmigrasi
595.1	Tata Guna Tanah
595.2	Landreform
595.3	Pengurusan Hak-hak Tanah
595.4	Pendaftaran Tanah
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan Konstruksi, Industri Kontruksi
602	Prakualifikasi
602.1	Daftar Rekanan Mampu
602.2	Tanda Daftar Rekanan
602.3	Kontraktor, Pemborong
602.4	Tender
602.5	Penunjukan
602.51	Penunjukan Langsung
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
604.1	Tanah dan Batu

- 604.2 Aspal
- 604.3 Besi dan Logam lainnya
- 604.31 Besi Beton
- 604.32 Besi Profil (Kontruksi)
- 604.33 Paku
- 604.34 Alumunium Profil
- 604.4 Bahan-bahan perlindungan dan pengawet (cat, tech, oil, pengawet kayu)
- 604.5 Semen
- 604.6 Kayu
- 604.7 Bahan Penutup Atap
- 604.8 Alat-alat penggantung dan pengunci
- 604.9 Bahan-bahan bangunan lainnya
- 605 Instalansi
 - 605.1 Instalansi Bangunan
 - 605.2 Instalansi Listrik
 - 605.3 Instalansi Air/Sanitasi
 - 605.4 Instalasi Pengatur Udara
 - 605.5 Instalansi Akustik
 - 605.6 Instalansi Cahaya/Penerangan
- 606 Konstruksi pencegahan
 - 606.1 Konstruksi pencegahan terhadap Kebakaran
 - 606.2 Terhadap Gempa
 - 606.3 Terhadap Angin / Udara / Panas
 - 606.4 Terhadap Kegaduhan
 - 606.5 Terhadap Gas / Explosive
 - 606.6 Terhadap Serangan
 - 606.7 Terhadap Radiasi Atom
- 610 PENGAIRAN
- 611 Irigasi
 - 611.1 Bangunan Waduk
 - 611.11 Bendungan
 - 611.12 Tanggul
 - 611.13 Pelimpahan Banjir
 - 611.14 Menara Pengambilan
 - 611.15 Pembangunan Dermaga
 - 611.2 Bangunan Pengambilan
 - 611.21 Bendungan
 - 611.22 Bendungan dengan Pintu Bilas
 - 611.23 Bendungan Dengan Pompa
 - 611.24 Pengambilan Bebas
 - 611.25 Pengambilan Bebas dengan Pompa
 - 611.26 Sumur Dengan Pompa
 - 611.27 Kantung Lumpur
 - 611.28 Silf Ekstretor
 - 611.29 Escope Chenel
 - 611.3 Bangunan Pembawa
 - 611.31 Saluran
 - 611.311 Saluran Saluran Induk
 - 611.312 Saluran Sekunder
 - 611.313 Suplesi
 - 611.314 Tersier
 - 611.315 Saluran Kwarter

- 611.316 Saluran Pasangan
- 611.317 Saluran Tertutup / Terowongan
- 611.32 Bangunan
 - 611.321 Bangunan Bagi
 - 611.322 Bangunan dan Sadap
 - 611.323 Bangunan Sadap
 - 611.324 Bangunan Check
 - 611.325 Bangunan Terjun
- 611.33 Bax Tersier
- 611.34 Got Miring
- 611.35 Talang
- 611.36 Syphon
- 611.37 Gorong-gorong
- 611.38 Pelimpahan Samping
- 611.4 Bangunan Pembuangan
 - 611.41 Saluran
 - 611.411 Saluran Pembuangan Induk
 - 611.412 Saluran Pembuangan Sekunder
 - 611.413 Saluran Pembuangan Tersier
 - 611.42 Bangunan
 - 611.421 Bangunan Out let
 - 611.422 Bangunan Terjun
 - 611.423 Bangunan Penahan Banjir
 - 611.43 Gorong-gorong Pembuangan
 - 611.44 Talang Pembuang
 - 611.45 Syphon Pembuangan
- 611.5 Bangunan Lainnya
 - 611.51 Jalan
 - 611.511 Jalan Inspeksi
 - 611.512 Jalan Logistik
 - 611.52 Jembatan
 - 611.521 Jembatan Inspeksi
 - 611.522 Jembatan Hewan
 - 611.53 Tangga Cuci
 - 611.54 Kubangan Kerbau
 - 611.55 Waduk Lapangan
 - 611.56 Bangunan Penunjang
 - 611.57 Jaringan Telephone
 - 611.58 Stasiun Argo
 - 611.59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
- 612 Polder
 - 612.1 Tanggul Keliling
 - 612.11 Tanggul
 - 612.12 Bangunan Penutup Sungai
 - 612.13 Jembatan
 - 612.2 Bangunan Pembawa
 - 612.21 Saluran
 - 612.211 Saluran Muka
 - 612.212 Saluran Pembawa Induk
 - 612.213 Saluran Pembawa Sekunder
 - 612.214 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
 - 612.22 Bangunan Bagi:
 - 612.221 Gorong-gorong

- 612.222 Syphon
- 612.3 Bangunan Pembuatan
- 612.31 Stasiun Pompa Pembuangan
- 612.32 Saluran
- 612.321 Saluran Pembawa Induk
- 612.322 Saluran Pembawa Sekunder
- 612.33 Pintu Air Pembuangan
- 612.34 Gorong-gorong Pembuangan
- 612.35 Syphon Pembuangan
- 612.4 Bangunan Lainnya
- 612.41 Bangunan
- 612.411 Bangunan Pengukur Air
- 612.412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- 612.413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
- 612.414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- 612.42 Rumah Petugas Eksploitasi
- 613 Pasang Surut
- 613.1 Bangunan Pembawa
- 613.11 Saluran Pembawa Induk
- 613.12 Saluran Pembawa Sekunder
- 613.13 Saluran Pembawa Tersier
- 613.14 Saluran Penyimpanan Air
- 613.15 Saluran Pintu Pembuangan
- 613.2 Bangunan Pembuangan
- 613.21 Saluran Pembawa Induk
- 613.22 Saluran Pembawa Sekunder
- 613.23 Saluran Pembawa Tersier
- 613.24 Saluran Penyimpanan Air
- 613.25 Saluran Pintu Pembuangan
- 613.3 Bangunan Lainnya
- 613.31 Kolom Pasang
- 613.32 Saluran
- 613.321 Saluran Lalu Lintas
- 613.322 Saluran Muka
- 613.33 Bangunan
- 613.331 Bangunan Penangkis Kotoran
- 613.332 Bangunan Pengukur Muka Air
- 613.333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
- 613.34 Jalan
- 613.35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
- 614.1 Bangunan Pengaman
- 614.11 Tanggul Banjir
- 614.12 Pintu Pengatur Banjir
- 614.13 Klep Pengatur Banjir
- 614.14 Tembok Pengaman Talud
- 614.15 Krib
- 614.16 Kantung Lumpur
- 614.17 Check Dam
- 614.18 Syphon
- 614.2 Saluran Pengaman
- 614.21 Saluran Banjir
- 614.22 Saluran Drainage

	614.23	Corepure
	614.3	Bangunan lainnya
	614.31	Warning System
	614.33	Stasiun
	614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
	614.322	Stasiun Pengukur Air
	614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
	614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615		Pengaman Pantai
	615.1	Tanggul
	615.2	Krib
	615.3	Bangunan Lainnya
616		Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
	616.1	Stasiun Pompa
	616.2	Bangunan Pembawa
	616.3	Bangunan Pembuangan
	616.4	Bangunan Lainnya
620		JALAN
621		Jalan Kota / Kabupaten
	621.1	Daerah Pengusaan
	621.11	Tanah
	621.12	Tanaman
	621.13	Bangunan
	621.2	Bangunan Sementara
	621.21	Jalan Sementara
	621.22	Kantor Proyek
	621.23	Gedung Proyek
	621.24	Barak Kerja
	621.25	Laboratorium Lapangan
	621.26	Rumah
	621.3	Badan Jalan
	621.31	Pekerjaan Tanah (earth work)
	621.32	Stabilisasi
	621.4	Perkerasan
	621.41	Lapisan Pondasi Bawah
	621.42	Lapisan Pondasi
	621.43	Lapisan Permukaan
	621.5	Drainage
	621.51	Parit Tanah
	621.52	Gorong-gorong (culvert)
	621.6	Buku Trotoir
	621.61	Tanah
	621.62	Perkerasan
	621.63	Pasangan
	621.7	Medium
	621.71	Tanah
	621.72	Tanaman
	621.73	Perkerasan
	621.74	Pasangan
	621.8	Daerah Sampingan
	621.81	Tanaman
	621.82	Pagar
	621.9	Bangunan Perlengkapan dan Pengaman

	621.91	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
	621.92	Lampu Penerangan
	621.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
	621.94	Patok-patok KM
	621.95	Patok-patok R.O.W. (sempadan)
	621.96	Rel Pengamanan
	621.97	Pagar
	621.98	Turap Penahan
	621.99	Bronjong
622		Jalan Provinsi
	622.1	Daerah Pengusaan
	622.11	Tanah
	622.12	Tanaman
	622.13	Bangunan
	622.14	Jalan Sementara
	622.15	Jembatan Sementara
	622.16	Kantor/Gedung Proyek
	622.17	Barak Kerja
	622.18	Laboratorium Lapangan
	622.19	Rumah
	622.2	Badan Jalan
	622.21	Pekerjaan Tanah (earth work)
	622.22	Stabilisasi
	622.3	Perkerasan (pavement)
	622.31	Lapis pondasi bawah
	622.32	Lapis Pondasi
	622.33	Lapis Permukaan
	622.4	Drainage
	622.41	Parit
	622.42	Gorong-gorong (culvert)
	622.43	Buku Trotoir
	622.44	Tanah
	622.45	Perkerasan
	622.5	Trotoir
	622.51	Tanah
	622.52	Perkerasan
	622.6	Medium
	622.61	Tanah
	622.62	Tanaman
	622.63	Perkerasan
	622.64	Pasangan
	622.7	Daerah Samping
	622.71	Tanaman
	622.72	Pagar
	622.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
	622.81	Rambu-Rambu
	622.82	Lampu Penerangan
	622.83	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
	622.84	Patok-patok KM
	622.85	Patok-patok R.O.W. (sempadan)
	622.86	Rel Pengamanan
	622.87	Pagar
	622.88	Turap Penahan

	622.89	Bronjong
623		Jalan Nasional
	623.1	Daerah Penguasaan
	623.2	Badan Jalan
	623.3	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
	623.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
	623.5	Median
	623.6	Daerah samping (pagar, tanaman)
	623.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)
630		JEMBATAN
631		Jembatan pada jalan Kota / Kabupaten
	631.1	Daerah Penguasaan
	631.11	Tanah
	631.12	Tanaman
	631.13	Bangunan
	631.2	Bangunan Sementara
	631.21	Jalan Sementara
	631.22	Jembatan Sementara
	631.23	Kantor Proyek
	631.24	Gedung Proyek
	631.25	Barak Kerja
	631.26	Laboratorium Lapangan
	631.27	Rumah
	631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
	631.31	Galian Tanah
	631.32	Timbunan Tanah
	631.4	Pondasi
	631.41	Pondasi Kepala Jembatan
	631.42	Pondasi Pilar
	631.43	Pondasi Angker
	631.5	Bangunan Bawah
	631.51	Kepala Jembatan
	631.52	Pilar
	631.53	Piloon
	631.54	Landasan
	631.6	Bangunan
	631.61	Gelagar
	631.62	Lantai
	631.63	Perkerasan
	631.64	Jalan Orang / Trotoir
	631.65	Sandaran
	631.66	Talang Air
	631.7	Bangunan Pengaman
	631.71	Turap / Penahan
	631.72	Bronjong
	631.73	Strek Dam
	631.74	Kist Dam
	631.75	Coupute
	631.76	Krip
	631.8	Bangunan Pelengkap
	631.81	Rambu-rambu / tanda-tanda lalu lintas
	631.82	Patok Pengamanan
	631.83	Patok R. O. W (sempatan)

631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Medium
632	Jembatan pada Jalan Provinsi
632.1	Daerah Penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan Sementara
632.21	Jalan Sementara
632.22	Jembatan Sementara
632.23	Kantor Proyek
632.24	Gedung Proyek
632.25	Barak Kerja
632.26	Laboratorium Lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
632.31	Galian Tanah
632.32	Timbunan Tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi Kepala Jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi Angker
632.5	Bangunan Bawah
632.51	Kepala Jembatan
632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan Orang / Trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang Air
632.7	Bangunan Pengaman
632.71	Turap / Penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan Pelengkap
632.81	Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas
632.82	Patok Pengamanan
632.83	Patok R. O. W (sempatan)
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage

	632.94	Baku
	632.95	Medium
633		<i>Jembatan pada Jalan Nasional</i>
	633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman bangunan)
	633.2	Bangunan Sementara (gudang proyek, kantor proyek)
	633.3	Pondasi
	633.4	Bangunan Bawah
	633.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
	633.6	Bangunan Pengamanan (bronjong strek dam, krib)
	633.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)
640		BANGUNAN
641		Bangunan Pemerintah
	641.1	Gedung Pengadilan
	641.2	Rumah Pejabat Negara
	641.3	Gedung DPR
	641.4	Gedung Balai Kota
	641.5	Penjara
	641.6	Perkantoran
642		Bangunan Pendidikan
	642.1	Taman Kanak-kanak
	642.2	SD & Sekolah Menengah
	642.3	Perguruan Tinggi
643		Bangunan Rekreasi
	643.1	Bangunan Olah Raga
	643.2	Gedung Kesenian
	643.3	Gedung Pemancar
644		Bangunan Perdagangan
	644.1	Pusat Perbelanjaan
	644.2	Gedung Perdagangan
	644.3	Bank
	644.4	Perkantoran
645		Bangunan Pelayanan Umum
	645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
	645.2	Gedung Parkir
	645.3	Rumah Sakit
	645.4	Gedung Telkom
	645.5	Terminal Angkutan Umum
	645.6	Terminal Angkutan Air
	645.7	Terminal Angkutan Darat
	645.8	Bangunan Keagamaan
646		Bangunan Peninggaln Sejarah
	646.1	Monumen
	646.2	Candi
	646.3	Kraton
	646.4	Rumah Tradisional
647		Bangunan Industri
648		Bangunan Tempat Tinggal
	648.1	Rumah Perkantoran
	648.11	Inti / Sederhana
	648.12	Sedang / Mewah
	648.2	Rumah Pedesaan
	648.21	Rumah Contoh
	648.3	Real Estate

649	Elemen Bangunan
649.1	Pondasi
649.11	<i>Diatas Tiang</i>
649.2	Dinding
649.21	Penahan Beban
649.22	Tidak Menahan Beban
649.3	Atap
649.4	<i>Lantai / Langit - langit</i>
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu / Jendela
649.51	Pintu Hermonik
649.52	Pintu Biasa
649.53	Pintu Sorong
649.54	Jendela Kayu
649.55	Jendela Sorong
649.56	Jendela Vertikal
650	TATA RUANG KOTA
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumaha (site & Servei)
653.1	Kepadatan Rendah (low density)
653.2	Kepadatan Tinggi (high density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (home industri)
655	Daerah Rekreasi (open spece)
655.1	Publik Garden
655.2	Sport & Playing fields
655.3	Open Space
656	Transportasi (tata letak)
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengering Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	<i>Bangunan Pengumpulan</i>
658.12	<i>Bangunan Pemusnahan</i>
658.2	Pengotoran Udara

- 658.3 Pengotoran Air
- 658.31 Air Buangan Industri
- 658.4 Kegaduhan
- 658.5 Kebersihan Kota
- 660 TATA LINGKUNGAN
- 660.1 Lingkungan Hidup
- 660.2 Kebersihan Lingkungan
- 660.3 Pencemaran
- 660.31 Pencemaran Air
- 660.32 Pencemaran Udara
- 660.33 Pencemaran Tanah
- 660.34 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
- 661 Kerusakan Lingkungan
- 661.1 Konservasi Pesisir Dan Laut
- 661.2 Konservasi Sumber Daya Alam
- 662 Penataan Hukum Lingkungan
- 663 Laboratorium Lingkungan
- 663.1 Air
- 663.2 Udara
- 663.3 Tanah
- 664 Analisis Dampak Lingkungan
- 665 Pengembangan Teknologi Lingkungan
- 666 Pengembangan Kapasitas
- 667 Pengamanan Lingkungan
- 670 KETENAGAAN
- 670.1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
- 671 Listrik
- 671.1 Kelistrikan
- 671.11 Perijinan
- 671.12 Rekomendasi
- 671.13 Pembinaan dan Pengawasan
- 671.14 Kelistrikan PLN
- 671.15 Kelistrikan Non PLN
- 671.2 Pembangkit Tenaga Listrik
- 671.21 PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
- 671.22 PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
- 671.23 PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
- 671.24 PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
- 671.25 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
- 671.26 PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
- 671.27 PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
- 671.3 Transmisi Tenaga Listrik
- 671.31 Gardu Induk / Gardu Penghubung/Gardu Trafo
- 671.32 Saluran Udara Tenaga Listrik
- 671.33 Kabel Bawah Tanah
- 671.4 Distribusi Tenaga Listrik
- 671.41 Gardu Distribusi
- 671.42 Tegangan Menengah
- 671.43 Tegangan Rendah
- 671.44 Jaringan Bawah Tanah
- 671.5 Pengusahaan Listrik
- 671.51 Sambungan Listrik
- 671.52 Penjualan Tenaga Listrik

671.53	Tarif Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap
679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN PEKERJAAN UMUM
690	AIR MINUM
691	Intako
691.1	Bromcaptering
691.2	Sumur
691.3	Bendungan
691.4	Saringan (screen)
691.5	Pintu Air
691.6	Saluran Pembawa
691.7	Alat Ukur
691.8	Perpompaan
692	Transmisi Air Baku
692.1	Perpipaan
692.2	Kutup Udara (Air Rolief)
692.3	Tutup Penguras (Blow oof)
692.4	Bak Pelepas Tekanan
692.5	Jembatan Pipa
692.6	Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
693.1	Bangunan Ukur
693.2	Bangunan Aerasi
693.3	Bangunan Pengendapan
693.4	Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
693.5	Bangunan Pengaduk
693.6	Bangunan Saringan
693.7	Perpompaan
693.8	Clear Hell
694	Distribusi
694.1	Reservoir menara bawah tanah
694.11	Menara
694.12	Reservoir menara bawah tanah
694.2	Perpimpaan
694.3	Perpompaan
694.4	Jembatan Pipa
694.5	Syphon
694.6	Hydran
694.61	Hydran Umum
694.62	Hydran Kebakaran
694.7	Katup
694.71	Katup Udara (air relief)
694.72	Katup Pelepas (blow off)
694.8	Bak Pelepas Tekanan (pressuer reducing valve)

700.1	Kebijakan dan program pengawasan
700.2	Pengawasan perencanaan pengadaan / proyek
701	Pengawasan Inventarisasi Asset
702	Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
703	Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
704	Pengawasan Penelitian / Riset
705	Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
706	Pengawasan Pertanahan / BPN
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	Pengawasan Pemerintahan Provinsi
712	Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
713	Pengawasan Pemerintah Desa
720	BIDANG POLITIK
721	Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll
722	Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud hankam
723	Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan,
724	Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME
730	BIDANG KEAMANAN / KETERTIBAN
731	Pengawasan Kesbangpolinmas
732	Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam / SAR
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	Pengawasan Pembangunan Desa
742	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
743	Pengawasan Kebudayaan
744	Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat
745	Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
746	Pengawasan Kesejahteraan Sosial
747	Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi
748	Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
749	Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
752	Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
753	Pengawasan Kehutanan
754	Pengawasan Pertambangan / ESDM
755	Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
756	Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
757	Pengawasan PMDN / PMA
758	Pengawasan Perbankan / Moneter
759	Pengawasan Kelautan dan Perikanan
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Pengawasan Pengairan
762	Pengawasan Jalan
763	Pengawasan Jembatan
764	Pengawasan Bangunan
765	Pengawasan Tata Ruang Kota
766	Pengawasan Tata Lingkungan
767	Pengawasan Ketenagaan
768	Pengawasan Air Minum
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	Penyimpangan Pejabat Publik
780	BIDANG KEPEGAWAIAN

781	Pengawasan Pengadaan PNS
782	Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
783	Keanggotaan PNS dalam Parpol
784	Penyimpangan Pejabat / PNS
785	Persengketaan PNS
790	BIDANG KEUANGAN
791	Pengawasan Anggaran
792	Pengawasan Akuntansi
793	Pengawasan Perbendaharaan
794	Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
795	Pengawasan Pendapatan
800	KEPEGAWAIAN
	Termasuk Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian
800.1	Perencanaan
800.2	Penelitian
800.3	Statistik
810	PENGADAAN
	Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai.
811	Pendaftaran CPNS
811.1	Testing
811.2	Screening
811.3	Pengumuman Tes dan Pemanggilan
812	Pengujian Kesehatan
813	Pengangkatan CPNS
813.1	Pengangkatan CPNS golongan I
813.2	Pengangkatan CPNS golongan II
813.3	Pengangkatan CPNS golongan III
820	MUTASI
821	Pengangkatan
821.1	Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
821.11	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I
821.12	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II
821.13	Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III
821.2	Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan sumpah janji
821.21	Eselon 1
821.22	Eselon 2
821.23	Eselon 3
821.24	Eselon 4
821.3	Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji
822	Kenaikan gaji berkala
822.1	PNS Golongan I
822.2	PNS Golongan II
822.3	PNS Golongan III
822.4	PNS Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat
823.1	PNS Golongan I

823.2	PNS Golongan II
823.3	PNS Golongan III
823.4	PNS Golongan IV
824	Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan
824.1	PNS Golongan I
824.2	PNS Golongan II
	PNS Golongan III
824.3	PNS Golongan IV
824.4	Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
825	Datasering dan Penempatan Kembali
827	Wajib Militer
830	KEDUDUKAN
831	Peninjauan Masa Kerja
832	Penyesuaian Perangkat / Gaji
832.1	PNS Golongan I
832.2	PNS Golongan II
832.3	PNS Golongan III
832.4	PNS Golongan IV
833	Penghargaan ijasah (pencantuman gelar)
834	Penghargaan lainnya
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
841	Tunjangan
841.1	Struktural dan Fungsional
841.2	Kehormatan
841.3	Dana Kematian (uang duka)
841.4	Tambahan Penghasilan
841.5	Tunjangan Cacat
842	Dana
842.1	Taspen
842.2	Askes, Bantuan Kesehatan
842.3	Bantuan Pendidikan
843	Perawatan Kesehatan
843.1	Poliklinik, Klinik Konsultan
843.2	Perawatan Dokter
843.3	Obat-obatan
843.4	Keluarga Berencana
845	Perumahan PNS
846	Dispensasi
850	C U T I
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Bersalin
855	Cuti karena Alasan Penting
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
860	PENILAIAN
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satyalencana Karya Satya
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Hadiah Berupa Kenaikan Pangkat

861.4	Pegawai Teladan
862	Hukuman
862.1	Ringan
862.2	Sedang
862.3	Berat
863	Konduite / DP3
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
865	Penliain Kinerja
865.1	Struktural
865.2	Fungsional
866	Rehabilitasi
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Formasi
872	Benzetting / Daftar Urutan Kepegawian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Taggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
875	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.1	Pelimpahan wewenang
875.2	Spesimen Tanda Tangan
876	Korps Kepegawaian
877	Surat Tugas
880	PEMEBERHENTIAN
881	Atas Permintaan Sendiri termasuk pengunduran diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol.I
882.2	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol.II
882.3	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol.III
882.4	Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Gol.IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal
884	Atasan lain, diantaranya keuzuran jasmani
885	Tidak dengan Hormat
886	Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas
887	Tali Asih Pensiun
890	PENDIDIKAN PEGAWAI
890.1	Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892.1	Diklatpim

	892.2	Diklat Teknis
	892.3	Diklat Fungsional
893		Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis
894		Pengembangan Pegawai
	894.1	Tugas Belajar
	894.2	Ijin Belajar
	894.3	Tunjangan Belajar
	894.4	Bantuan Pendidikan
	894.5	Penempatan Kembali
895		Metode
	895.1	Kuliah
	895.2	Ceramah, Symposium
	895.3	Diskusi
	895.4	Kuliayah Lapangan/OL, Widya Wisata, KKN
	895.5	Kurikulum
	895.6	karya Tulis
896		Tenaga Pengajar, Narasumber
897		Administrasi Pendidikan
898		Fasilitas Pendidikan
899		Sarana Pendidikan
900		KEUANGAN
	901	Nota Keuangan
	902	APBN
	903	APBD
	910	ANGGARAN
	911	Keputusan ttg penunjukan peneglolaan keuangan SKPD/PPKD
	912	Keputusan Gubernur ttg penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
	913	DPA / DPPA / DPAL-SKPD / PPKD
	914	Anggaran kas
	915	Surat Penyediaan Dana(SPD)
	920	AKUNTANSI
	921	Laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
	930	PERBENDAHARAAN
	931	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
	932	Surat Penolakan Penerbitan (SP2D)
	933	Surat Penguji SP2D
	940	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
	941	Bintek-bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan
	950	PENGELOLAAN KAS DAERAH
	951	Laporan pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
	952	Laporan rekapitulasi penerimaan daerah
	953	Daftar pemotongan dan penyetoran Pajak (PPN/PPh) dari CV/PT/Instansi
	954	Surat tanda setoran (STS)
	955	Laporan Realisasi Daerah
	955.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
	955.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
	956	Rekonsiliasi

956.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
956.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
957	Laporan Mutasi Penempatan Deposito
958	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
960	EVALUASI DAN PENGENDALIAN
961	Tuntutan Ganti Rugi
962	Tuntutan Perbendaharaan
963	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
964	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
965	Edaran-edaran
970	PENDAPATAN
971	Pertimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan (PHTB)
971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam/ Migas
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas air
973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang Kesehatan
974.2	Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata
974.3	Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk pasar)
974.4	Retribusi Bidang Pertanian dan Pertenakan (termasuk pemotongan hewan)
974.5	Retribusi Bidang Perhubungan, komunikasi informasi dan Teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi,
974.6	Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)
974.7	Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
974.8	Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan air permukaan dan metrologi
974.9	Retribusi Bidang lainnya (termasuk sampah)
975	Bea
975.1	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
975.2	Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air
976	Cukai
977	Pungutan
978	Bantuan
978.1	Bantuan Presiden
978.2	Bantuan Menteri
978.3	Bantuan Gubernur
978.4	Bantuan Bupati
978.5	Bantuan Lainnya

- 979 Pendapatan Lainnya
- 979.1 Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak terpisahkan
 - 979.11 Pelepasan Hak Atas Tanah
 - 979.12 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
 - 979.13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
 - 979.14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
 - 979.15 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
 - 979.16 Penjualan Drum Bekas
 - 979.17 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
 - 979.2 Penerimaan Jasa Giro
 - 979.21 Jasa Giro Kas Daerah
 - 979.22 Jasa Giro Pemegang Kas
 - 979.23 Jasa Giro Khusus
 - 979.3 Penerimaan Bunga Bank
 - 979.31 Bunga Deposito
 - 979.32 Bunga Tabungan
 - 979.4 Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
 - 979.41 Sumbangan Pihak Ke Tiga
 - 979.42 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Dealer)
 - 979.43 Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu
 - 979.5 Penerimaan Lain-lain
 - 979.51 Penerimaan Kembali Kredit BKK
 - 979.52 Ternak tidak Layak Bibit
 - 979.53 Sewa Internet
 - 979.54 Penerimaan Dari Dana Bergulir/Revolving
 - 979.55 Kerjasama dengan BUMIDA
 - 979.56 Penerimaan DUKS
 - 979.57 Tempat Rekreasi Nusakambangan
 - 979.58 Setoran TP-TGR
 - 979.59 Penerimaan Lainnya dari Setda/SKPD

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002